

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA KUALA
TERUSAN KECAMATAN PANGKALAN KERINCI KABUPATEN
PELALAWAN**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral *Comprehensive*
Sarjana S1 Administrasi Negara Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**



OLEH

ZULFIAN ARRASYIDI

NIM. 10675005179

PROGRAM S1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2013

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA KUALA TERUSAN KECAMATAN PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN

Oleh:

ZULFIAN ARRASYIDI

Berdsasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang salah satu nya mengamanatkan dilaksanakannya perencanaan pembangunan dari bawah secara baik. Dalam hal ini pelaksanaan pembangunan fisik di desa kuala terusan kecamatan pangkalan kerinci kabupaten pelalawan bertujuan untuk mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan pembangunan di desa kuala terusan.

Populasi dalam penelitian adalah seluruh masyarakat desa berdasarkan 213 Kartu Keluarga. Untuk pengambilan sampel penulis menggunakan teknik random sampling. Untuk menentukan pengambilan sampel penulis menggunakan rumus slovin dalam perhitungan sampel dengan kelonggaran ketidaktelitian 10% dengan demikian maka jumlah sampel yang di ambil dari populasi masyarakat berdasarkan kartu keluarga adalah 68,05 yang di bulatkan menjadi 68 orang. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada bulan mei 2013 sampai selesai.

Hasil penelitian tersebut dengan melakukan wawancara terhadap responden dan pengamatan penulis dilapangan bahwa pelaksanaan pembangunan fisik di desa kuala terusan kecamatan pangkalan kerinci kabupaten pelalawan belum berjalan secara baik dalam penyelenggaraan pembangunan.

Keyword : analisis pelaksanaan pembangunan

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Adapun skripsi yang mengambil judul **“ANALISIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA KUALA TERUSAN KECAMATAN PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN”** diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mengikuti ujian Munaqasah pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan, tentunya dengan maksud guna penyempurnaan skripsi ini. Sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, mudah-mudahan mendapat pahala di sisi Allah SWT.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setulus hati sepenuh jiwa, penulis ucapkan kepada:

1. ALLAH SWT karena dengan ridhoNyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayahanda Muchtardan Ibunda tercinta Zaurah, yang tak henti-hentinya memberikan dukungan moril dan materil serta dukungan doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Jurusan

Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Mudah-mudahan perjuangan bapak dan ibu mendapat balasan yang setimpal dari Allah S.W.T.

3. Bapak Prof.DR.H.M.Nazir selaku Rektor UIN Suska Riau
4. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Afrizal, S.sos.M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara dan Bapak Rusdi S.Sos selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Devi Deswimar, S.Sos, M.Siselaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu serta pikiran dalam membimbing penulis guna penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap Pegawai Kantor Kepala Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan selama penelitian.
8. Kakak,abang-abang dan adikku yang selalu memberikan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih untuk kesabaran dan pengertiannya.
9. Thanks to anak-anak hunter ,helmy,koesmar ,rian.alin,medi,andy ,upir, putra,eta ,lia,ben,rany.

Akhirnya atas segala bantuan semua pihak, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, semoga semua ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin...

Pekanbaru, 25 Oktober 2013

Penulis

Zulfian Arrasyidi
NIM. 10675005179

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	9
1.3.1. Tujuan Penelitian	9
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II TELAAH PUSTAKA	12
2.1. Kerangka Teori.....	12
2.1.1. Pengertian Kebijakan	12
2.1.2. Pelaksanaan Kebijakan	17
2.1.3. Standard dan Tujuan Kebijakan	24
2.1.4. Pelayanan Publik	25
2.2. Konsep Operasional	31
2.3. Hipotesa	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1. Jenis Penelitian.....	37
3.2. Lokasi Penelitian.....	37
3.3. Populasi dan Sampel	37
3.3.1. Populasi	37
3.3.2. Sampel	38
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.4. Sumber Data.....	41

3.4.1. Data Primer	41
3.4.2. Data Sekunder	42
3.6. Analisa Data	42
DAFTAR PUSTAKA	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semenjak Runtuh rezim Orde baru dan adanya reformasi dari tatanan pemerintahan banyak daerah di setiap Provinsi mengalami pemekaran guna mengembangkan otonomi daerah. Salah satu pemekaran tersebut adalah terciptanya Kabupaten Pelalawan, hasil dari pemekaran Kabupaten Kampar. sebagai ibukota kabupaten, Pangkalan Kerinci merupakan salah satu kota industri yang pertumbuhan penduduknya terus bertambah sehingga kota ini merupakan tujuan bagi para pendatang dari berbagai daerah di Nusantara ini. Dari segi pemerintahan daerah juga menunjukan *exsistensi* dan perkembangan yang *signifikan*.

Peranan Pemerintah Kecamatan memiliki perubahan yang cukup mendasar. Kecamatan sekarang lebih berfungsi sebagai pelaksana administrasi, sedangkan fungsi pembangunan lebih diserahkan kepada masing-masing desa/kelurahan. Justru disini peranan kecamatan lebih tepat sebagai pendorong pembangunan desa/kelurahan dan memfasilitasi sinergi antar desa/kelurahan untuk mendorong sinergi pembangunan antar desa/kelurahan.

Kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah kecamatan disusun

berdasarkan rencana kerja kecamatan. Rencana kerja kecamatan sebagaimana disusun berdasarkan rencana strategis kecamatan.

Seperti diketahui bahwa salah satu tugas dari kecamatan adalah membantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPPD) mensosialisasikan memantau pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan desa dan alokasi dana desa yang mana untuk Kecamatan Pangkalan Kerinci mempunyai 4 desa dan 3 kelurahan dengan kegiatan pembangunan infrastruktur desa/kelurahan, seperti: perbaikan jalan, renovasi balai desa/kelurahan, pembangunan pos ronda, dan pembuatan gapura desa, seperti diketahui salah satu desa yang ada yaitu Desa Kuala Terusan dengan program kerja antara lain; pembanguna gapura desa dan pembuatan pos ronda.

Walaupun merupakan satuan dari organisasi satuan kerja perangkat daerah, tetapi kecamatan mempunya karateristik yang berbeda karena kepemilikan wilayah yang harus diperhatikan dari sisi pembangunan infrastruktur maupun sosialnya. Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (MUSRENBANGCAM) merupakan suatu proses pembahasan, penilaian dan penentuan urutan prioritas rencana pembangunan yang berasal dari masyarakat dan dari pemerintah di tingkat kecamatan. Proses pembahasan dilakukan secara terpadu dan obyektif bersama unsur-unsur terkait dari tingkat kelurahan/desa, kecamatan dan kabupaten/kota untuk menghasilkan rencana pembangunan tahunan kecamatan serta daerah.

Jika dilihat dari birokrasi pemerintahan yang sekarang sedang berjalan, pemerintahan daerah dituntut untuk menata kembali format organisasi

pemerintahan dan aktivitasnya. Selama ini pemerintahan yang dijalankan belum dilaksanakan secara maksimal, hal ini dikarenakan kinerja aparat yang masih lemah. Secara substantif, menurut *Rasyid* (2001 : 48), tugas pokok pemerintahan dibagi dalam 3 fungsi pokok, yakni :

1. Pelayanan (*service*)
2. Pemberdayaan (*empowerment*)
3. Pembangunan (*development*)

Ketiga fungsi pemerintahan diatas memiliki keterkaitan satu sama lainnya, yakni :

1. Fungsi pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat
2. Fungsi pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat
3. Fungsi pembangunan akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat.

Dari ketiga fungsi diatas, fungsi pelayanan memegang peranan yang paling penting dari suatu pemerintahan, khususnya pemerintah yang ada di daerah, karena dari pelayanan itulah akan diketahui kualitas suatu pemerintahan.

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamanatkan dilaksanakannya perencanaan pembangunan dari bawah secara baik. Dalam rangka pelaksanaan otonomi, perencanaan pembangunan kecamatan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah (kabupaten/kota) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Payung hukum untuk pelaksanaan musrenbang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

MUSRENBANG kecamatan juga bisa diatur dengan aturan daerah yang sudah ada:

1. Memberikan wahana untuk mensinergikan dan menyepakati prioritas usulan-usulan masalah yang berasal dari masyarakat tingkat desa/kelurahan yang menjadi skala pelayanan atau kewenangan kecamatan dan lintas kecamatan untuk satu tahun mendatang.
2. Merumuskan dan menyepakati kegiatan-kegiatan yang akan dimusyawarahkan dalam forum-forum SKPD dan MUSRENBANG daerah.
3. Menetapkan delegasi kecamatan untuk mengawal usulan-usulan permasalahan kecamatan yang merupakan kegiatan supra kecamatan (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)

Peran/tugas utama peserta adalah berpartisipasi secara aktif dalam proses musyawarah sampai pengambilan keputusannya. Berpartisipasi secara aktif bukan hanya berarti pandai dan banyak bicara, melainkan juga mampu mendengarkan aspirasi dan pandangan orang lain serta menjaga agar MUSRENBANG benar-benar menjadi forum musyawarah bersama

Hal ini di ketahui dari sejumlah informasi yang di peroleh di lapangan misalnya;

- a. Bahwa terjadinya perencanaan yang tidak sesuai dengan rencana semula yang mana rencana yang ada yaitu membangun Desa Kuala Terusan secara menyeluruh, namun sampai saat ini belum berjalan. seperti terlihat bahwa sejak tahun 2011 dengan anggaran sebesar Rp.65.000.000,- rencananya akan dilakukan pembangunan dalam bidang infrastruktur seperti pembuatan pasar sebanyak 5 los dan bantuan material mesjid, namun kenyataannya sampai

tahun 2012 rencana tersebut tidak pernah selesai memang ada pembuatan pasar namun baru sekitar 2 los yang selesai. (Sumber: hasil wawancara dengan Kepala Desa Kuala Terusan hari senin tanggal 4 Januari 2013 di kantor Desa Kuala Terusan).

Tabel I.1. Jumlah APB DESA Kuala Terusan Tahun 2011-2012

No	Thn	APB DESA	Perdes	Sumber		Penggunaan
				Pemerintah	Swadaya	
1	2011	55.000.000,-	Kep Kep Desa No. SK- PC/VI/2011/419	55.000.000,-	-	-Pembuatan plapon balai desa -Adm kegiatan -Pembuatan posyandu
2	2012	75.000.000,-	Kep Kep Desa No. SK- PC/VI/2012/420	75.000.000,-		-Pembuatan tangga pemandian -Bantuan material mesjid -Pembuatan pasar dan MCK (5 los)

Sumber : Kantor Kepala Desa Kuala Terusan 2012

Dalam hal ini yang menjadi masalah adalah rendahnya partisipasi masyarakat serta desa hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah Kabupaten saja untuk melakukan pembangunannya tanpa ada usaha dari pemasukan lain.

- b. Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pembangunan Desa Kuala Terusan sebenarnya telah ada namun pencairannya tidak secara keseluruhan sehingga pelaksanaan pembangunan yang ada tidak berjalan seperti

pembangunan jalan sepanjang 3 KM yang dilakukan anggaran semestinya adalah sebesar Rp. 77.912.145,- namun turun anggarannya sebesar 57.315.067,- (Sumber: hasil wawancara dengan Kontraktor Pelaksana PT. Kinara Pusaka hari Rabu tanggal 06 Januari 2013 di kantor PT. Kinara Pusaka Kabupaten Pelalawan).

Selanjutnya dapat dilihat disini usulan dan realisasi yang terdapat di Desa Kuala Terusan:

Tabel I.2. Usulan dan Realisasi Pembangunan di Desa Kuala Terusan

No	Rencana Pembangunan	Usulan /target	Realisasi
1	-Pembuatan plapon balai desa	-Pembuatan plapon balai desa	-Pembuatan plapon balai desa
2	-Adm kegiatan	-Adm kegiatan	-Adm kegiatan
3	-Pembuatan posyandu	-Pembuatan posyandu	-Pembuatan posyandu
4	-pengaspalan jalan 10 Km	-Pembuatan pasar dan MCK (5 los)	-Pembuatan pasar dan MCK (2 los)
5	-Renovasi balai desa	-Pengaspalan jalan	- Tidak terealisasi
6	-renovasi jembatan desa	-Renovasi Balai desa	- Tidak terealisasi
7	-Pembuatan pasar dan MCK (5 los)	-Pembuatan pagar kantor desa	- Tidak terealisasi
8	-Pembuatan pagar kantor Desa	-Pengaspalan jalan 10 Km	- Tidak terealisasi

Sumber : Kantor Kepala Desa Kuala Terusan 2012

Dengan melihat data tabel di atas diketahui masih ada usulan yang diajukan desa tidak direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten seperti renovasi balai desa, hal ini menandakan bahwa kepala desa harus lebih jeli untuk mengajukan permintaan anggaran pembangunan ke Pemerintah Kabupaten agar selalu direalisasikan langsung.

Berdasarkan uraian dan gejala yang ada maka disini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **Analisis Pelaksanaan Pembangunan Fisik**

di Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

1.2. Perumusan Masalah

Kinerja yang diharapkan oleh suatu organisasi termasuk organisasi pemerintahan yang melayani keperluan publik adalah kinerja yang dapat memberikan kontribusi kepada organisasi yang bersangkutan sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuan dan efisien baik dalam menjalani tugas administrasi, tugas pemerintahan dan tugas sebagai pelayan publik. Untuk tercapainya peranan yang ada tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah terdapatnya suatu perencanaan kegiatan maka untuk itu penulis merumuskan masalah pokok yaitu :

Bagaimana Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Adapun Tujuan Penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan :

- a. Sebagai bahan masukan bagi para birokrasi dalam Pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
- b. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan bagi almamater dimana penulis menuntut ilmu.
- c. Sebagai bahan acuan bagi peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian dengan mengambil judul yang sama.

I.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas masalah yang berhubungan dengan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai teori yang di jadikan pedoman dalam melakukan pembahasan penelitian ini, serta hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta analisa data.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang, sejarah singkat Kabupaten Pelalawan dan Kecamatan Pangkalan Kerinci.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai analisa data dari setiap indikator yang ada.

BAB VI KESIMPULN DAN SARAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran dari seluruh analisa yang telah dilakukan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Pengertian Otonomi Daerah

Menurut pasal 1 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang pemerintahan daerah mendefenisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan Sumaryadi (2005:48) mengatakan, otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sebagai manifestasi dari desentralisasi. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang dan mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Widjaja (2009:76-77) menjelaskan, otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah dengan otonomi adalah proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan masyarakat.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain; menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan, sejalan dengan penyerahan urusan, apabila urusan tersebut akan menjadi beban daerah, maka akan dilaksanakan melalui asas pembangunan.

Dengan demikian, dampak pemberian otonomi daerah ini tidak terjadi pada organisasi/administrative pemerintah saja, akan tetapi berlaku juga pada masyarakat (publik). Peranan masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah akan semakin besar dan menentukan. Perlu kita sadari tanpa meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta, otonomi akan kehilangan makna dasarnya. Melalui otonomi, pemerintah daerah mempunyai peluang yang lebih besar untuk mendorong dan memberi motivasi membangun daerah yang kondusif, sehingga akan munculnya kreasi dan inovasi masyarakat yang dapat bersaing dengan

daerah lain. Disamping itu, daerah dapat membangun pusat pertumbuhan daerah, mengingat daerah lebih akrab dengan masyarakat dan lingkungannya.

Otonomi daerah tidak dipandang semata-mata sebagai hak dan wewenang, akan tetapi lebih merupakan kewajiban dan tanggung jawab, sehingga bagi daerah dituntut mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM), kelembagaan ketatalaksanaan, kualitas personal (birokrat), kelayakan organisasi, dan kecanggihan administrasi.

Menurut Josef (2007:66-70) ada 4 faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah:

1. Manusia pelaksanaannya harus baik.

Manusia merupakan subjek atau pelaku dalam setiap aktivitas pemerintahan sebagai penggerak proses mekanisme dalam pemerintahan harus baik agar tercapainya tujuan yang diharapkan, pengertian baik disini meliputi:

- a. Mentalitasnya/moralnya baik dalam arti jujur, mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaan, dapat bersikap sebagai abdi masyarakat.
- b. Memiliki kecakapan/kemampuan yang tinggi untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

2. Keuangan harus cukup dan baik

Mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang, antara lain berupa sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup, dan

pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku.

3. Peralatannya harus cukup dan baik

Setiap benda atau alat yang dapat digunakan untuk dapat memperlancar pekerjaan atau kegiatan pemerintah daerah. Peralatan yang baik (praktis, efisien, dan efektif).

4. Organisasi dan manajemennya harus baik

Organisasi yang dimaksudkan adalah organisasi dalam arti struktur yaitu susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat, kekuasaan, tugasnya dan hubungannya satu sama lain, dalam rangka mencapai sesuatu tujuan tertentu, sedangkan yang dimaksudkan dengan manajemen adalah proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerjasama, sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai.

Kemudian Durumurti (2002:1-2) mengemukakan otonomi daerah mengandung beberapa segi:

- a. Bahwa otonomi daerah bukan skema kedaulatan daerah dalam konteks Negara federal. Otonomi daerah dalam kerangka undang-undang Dasar 1945 pasal 18 yang menyebutkan pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, sebagai bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara hak asal usul dalam negara yang bersifat Istimewa.

- b. Kebijakan otonomi lebih merupakan perubahan dalam tatanan susunan kekuasaan, termasuk dalam perubahan dalam prinsip kerja pemerintah dimana daerah mendapat kewenangan untuk mengatur urusan daerahnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian otonomi mempunyai daya skema, otonomi dipandang sebagai pendekatan baru dalam menjalankan pembangunan. Pendekatan baru ini tentunya akan menumbuhkan bukti praktis dimana kekuasaan pusat memberikan kepercayaan penuh terhadap daerah untuk mensejahterakan rakyat dengan menjaga integrasi bangsa.
- c. Proses yang dijalankan orde baru tidak memberikan kepada partisipasi masyarakat tidak seksama menunjukkan bagaimana akibat elitisme politik tersebut. Akibat dari sesuatu yang dimaksud tersebut bukan sesuatu yang ditanggungoleh elit politik melainkan oleh masyarakat. Dari ketiga segi tersebut dinyatakan bahwa otonomi daerah pada dasarnya adalah sebuah koreksi terhadap struktur kekuasaan yang semula lebih berakar ke atas menjadi model baru yang berorientasi ke bawah.

Syamsudin Haris (2009:9) menyatakan visi otonomi daerah itu sendiri dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksinya yang utama: Politik, ekonomi, serta sosial budaya.

- a. Bidang politik, otonomi daerah adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan semokrasi, maka ia harus difahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan

pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik. Otonomi daerah juga berarti kesempatan membangun struktur Pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun sistem dan pola karier dan administratif yang kompetitif, serta mengembangkan system manajemen pemerintahan yang efektif.

- b. Bidang ekonomi; otonomi daerah itu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di lain pihak terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam konteks ini, otonomi akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perjanjian usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi daerah.
- c. Bidang sosial dan budaya; otonomi harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan di sekitarnya.

Sumarayadi (2005:64) mengemukakan tujuan pemberian otonomi daerah yang mengemukakan ada tiga hal yang lebih desentralistik yaitu sebagai berikut:

- a. Pembangunan masyarakat sebagai pengadaan pelayanan masyarakat.
Pembangunan masyarakat identik dengan peningkatan pelayanan dan

pemberian fasilitas sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan sanitasi yang secara keseluruhan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- b. Pembangunan masyarakat sebagai upaya terencana mencapai tujuan sosial yang kompleks dan bervariasi. Pembangunan masyarakat dapat diartikan sebagai tujuan sosial yang lebih sulit dan sukar diukur seperti keadilan, pemerataan, peningkatan kebudayaan kedaiaian dan sebagainya. Disini pembangunan di tekankan pada makna *community self reliance* dan *family self reliance*.
- c. Pembangunan sosial sebagai upaya terencana untuk meningkatkan kemampuan manusia berbuat. Pembangunan disini merupakan derivasi (penyimpangan) dari paradigma (pedoman) pembangunan yang berpusat pada manusia/rakyat atau *people centered development*.

A. Pelaksanaan

Agar pelaksanaan setiap kegiatan lebih terarah dan dapat memperoleh hasil yang lebih baik, maka seharusnya setiap kegiatan tersebut harus direncanakan terlebih dahulu.

Berkaitan dengan pengertian perencanaan, ada beberapa sarjana yang mengemukakan pendapatnya antara lain Kuswata (2005:102) yang mengatakan bahwa Perencanaan adalah suatu penentuan urutan tindakan biaya serta penggunaan waktu dan tenaga untuk suatu kegiatan yang didasarkan atas data-data dengan memperhatikan skala prioritas yang wajar dan efisien untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai, sehingga komponen-komponen harus

dipadukan secara tepat dan serasi, agar terhindar dan timbulnya pemborosan yang meliputi tenaga, bahan, waktu dan biaya.

Selanjutnya Fiedmann (2002:307) mengatakan bahwa perencanaan itu tidak semata-mata merupakan persoalan instrumentasi saran-saran secara efisien, ia adalah suatu proses yang mungkin mengantar masyarakat menemukan masa-masa depannya.

Biasanya perencanaan itu berupa program yang hanya memuat garis-garis besarnya saja, sedangkan penjabaran yang lebih mendetail dituangkan dalam bentuk proyek.

Bertitik tolak dan pengertian perencanaan yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa perencanaan itu adalah kegiatan menyusun suatu program yang dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan dana, waktu, tenaga dan skala prioritas dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.

Sedangkan maksud dan perencanaan itu menurut Tjokroamidjojo (2007 : 13) adalah perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lebih adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis bagi kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Selanjutnya menurut Koesoemohatmodjo (2009:07) maksud dan perencanaan adalah Untuk mendapatkan suatu landasan kegiatan yang disusun secara menyeluruh berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan maksud perencanaan itu.

Jadi dapat ditarik suatu pengertian bahwa perencanaan berguna untuk mempermudah mencapai tujuan yang ditetapkan dengan sebaik-baiknya. Perencanaan mempunyai arti penting dalam pembangunan. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kuswata (2005:102) bahwa perencanaan mempunyai peranan penting dalam menunjang keberhasilan suatu kegiatan, Kegiatan di sini adalah kegiatan pembangunan.

Kemudian Wilson dalam Sarwoto (2005:72) mengatakan bahwa Perencanaan penting karena di dalamnya digariskan secara bebas dan tepat tujuan, baik yang berjangka panjang, maupun yang berjangka pendek dan digariskan pula apa saja yang harus dilakukan agar tujuan-tujuan tersebut tercapai.

Suatu perencanaan yang baik, akan sangat berperan dalam menunjang pembangunan, karena perencanaan yang baik akan memberikan peranan sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan
2. Sebagai alat pengendalian, pengawasan dan penilaian
3. Sebagai ukuran untuk mengetahui sasaran sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan
4. Untuk memperoleh daya guna dan hasil guna yang optimal
5. Sebagai alat untuk memberikan suatu keyakinan dan pendapat.

(Kuswata, 2005 : 98)

Agar tujuan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya, maka tentu saja harus disusun suatu perencanaan yang baik. Suatu perencanaan dikatakan baik apabila

dapat menjawab dengan sebaik-baiknya 6 (enam) unsur pertanyaan mendasar, yaitu:

1. Apa (*what*), yakni mengenai materi kegiatan apa yang akan dilaksanakan.
2. Mengapa (*why*), yaitu alasan memilih dan menetapkan kegiatan tersebut dan mengapa di prioritaskan.
3. Bagaimana dan berapa (*how and how much*), yaitu mengenai cara dan teknis pelaksanaan yang dibutuhkan dengan dana yang tersedia.
4. Dimana (*where*), yaitu pemilihan tempat yang strategis untuk pelaksanaan kegiatan (proyeksi).
5. Kapan (*when*) yaitu pemilihan waktu yang tepat.
6. Siapa (*who*), yaitu menentukan orang yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. ini merupakan subjek pelaksanaan. Kadang-kadang diperlukan juga untuk menentukan siapa sebagai objek pelaksanaan kegiatan. Siapa disini merupakan *whom*. (Syamsi, 2006 134-135)

B. Perencanaan Pembangunan

Pada mulanya perencanaan pembangunan hanya dilakukan di bidang ekonomi. Setelah perkembangan zaman, perencanaan tidak hanya dikenal di bidang ekonomi, melainkan juga dikenal adanya perencanaan pembangunan, baik pembangunan ekonomi, politik, Sosial budaya dan lain-lain.

Definisi dari pembangunan Soemarwoto (2003:139) dapat dicermati sebagai berikut :

“Perencanaan pembangunan pada dasarnya untuk melakukan rencana dan menaikkan taraf atau tingkat hidup dan dapat pula dikatakan bahwa pembangunan bertujuan untuk menaikkan mutu kehidupan, karena mutu hidup dapat diartikan sebagai derajat untuk memenuhi kebutuhan dasar”.

Jadi perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat yang lebih baik. Lebih lanjut dikatakan oleh Suryadi (2005:64) bahwa pembangunan adalah suatu proses dimana masyarakat mulai mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama-sama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut.

Menurut Hakim (2002:129) Perencanaan pembangunan adalah upaya-upaya pemerintah mengkoordinasi kebijakan untuk mencapai tujuan perekonomian nasional seperti pengurangan kemiskinan atau percepatan pertumbuhan.

Sedangkan menurut Todaro (2000:652) perencanaan pembangunan adalah upaya-upaya pemerintah mengkoordinasi pembuatan keputusan dalam jangka panjang, serta untuk mempengaruhi, mengarahkan demi terciptanya ujuan pembangunan yang telah di tetapkan sebelumnya.

C. Teori Pembangunan

Pembangunan pada intinya dilakukan adalah untuk melakukan perubahan ditengah masyarakat. Membawa masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan defenisi-defenisi yang bermacam-macam . Namun secara umum ada

suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan.

Menurut Siagian (2004:12) Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernisasi dalam rangka pembinaan (*Nation Building*)”.

Sedangkan Kartasasmita (2004:23) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentifikasikan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan *modernisasi* dan *industrialisasi*, bukan pembangunan dengan *westernisasi*, secara keseluruhan mengandung arti perubahan, namun pemikiran tersebut memiliki perbedaan yang cukup prinsip, karena masing-masing mempunyai latar belakang, asas dan hakikat yang berbeda setiap prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan.

Menurut Bartakusumah (2005 :5) bahwa sebagaimana dikemukakan oleh para ahli, pembangunan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana, sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan.

Menurut Suryadi (2005:64) bahwa pembangunan adalah suatu proses dimana masyarakat mulai mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka,

kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama-sama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut.

Menurut Hasibuan (2001:68) pembangunan adalah usaha untuk meningkatkan teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan.

Menurut Soedjatmojo dalam Nugroho dan Randi (2007: 11) pembangunan tidak lain adalah belajar untuk hidup lebih baik dari pada hari kemarin, dan pembelajaran adalah bagian dari inti pembangunan pada zaman kini dan mungkin sampai kurun waktu yang panjang dimasa depan.

Negara Indonesia saat ini tengah menerapkan sistem pemerintahan daerah sesuai dengan perundang-undangan No 32 Tahun 2004 yang menganti penyempurnaan dari UU No 22 Tahun 1999, menurut Suharto (2008:5) menyatakan bahwa setidaknya pembangunan harus memiliki tujuan yang satu sama lain saling terkait:

1. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan kepada seluruh anggota masyarakat.
2. Mencapai kualitas hidup yang bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan secara material, melainkan juga untuk mewujudkan kepercayaan diri dan kemandirian bangsa.
3. Memperluas kesempatan ekonomi dan sosial bagi individu dan bangsa melalui pembebasan dari perbudakan dan ketergantungan pada orang atau bangsa lain serta pembebasan dari kebodohan dan penderitaan.

Pembangunan selain menjadi kewajiban pemerintah pusat juga merupakan kewajiban masing-masing pemerintah di daerah. Dalam rangka

efektifitas konsep sistem terbuka perencanaan strategis dalam pembangunan pedesaan.

Dalam hal ini Sufian (2005 : 5) menyatakan sebaiknya meliputi upaya-upaya besar yang satu sama lain saling berkaitan. Upaya-upaya besar tersebut merupakan bagian dari konsep sistem terbuka perencanaan strategis dalam pembangunan pedesaan yang konsektual, antara lain :

1. Memberdayakan ekonomi masyarakat Desa, melalui upaya : pemberdayaan koperasi dan bahan pertanian, masukan modal, penyediaan teknologi, penataan kembali sistem produksi dan distribusi dan pemasaran produk pedesaan.
2. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintah dan masyarakat pedesaan, melalui pendidikan dan pelatihan serta proses pembelajaran. Upaya ini sekurang-kurangnya harus meliputi aspek pendidikan, kesehatan dan gizi.
3. Memfungsikan semua lembaga-lembaga yang ada termasuk instansi terkait yang bertugas sebagai pelopor (agen) pembangunan pedesaan.
4. Membimbing dan mengarahkan masyarakat pedesaan untuk melakukan berbagai kegiatan yang produktif, serta memberikan contoh dalam kegiatan perkebunan, pertanian, perikanan dan lain-lain dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
5. Membangun sarana-prasarana pedesaan serta memberikan kemudahan bagi para investor nasional dan internasional untuk berinvestasi di pedesaan.

6. Mengarahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan pertanian yang sesuai dengan kondisi dan struktur tanah, potensi alam dan potensi masyarakat serta kondisi permintaan pasar.

Menurut Peraturan Daerah (PERDA NO 13 tahun 2007, pasal 2). Menerangkan bahwa pembangunan adalah upaya / proses perubahan yang lebih baik, baik itu diartikan dalam kepentingan masyarakat di segala bidang baik desa dan kelurahan. Pembangunan desa di selenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuan dan kesatuan desa.

D. Pembangunan Desa

Desa sebagai salah satu entitas pemerintahan paling rendah menjadi arena paling tepat bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan kepentingannya guna menjawab kebutuhan kolektif masyarakat.

Mengacu pada UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 206 disebutkan bahwa kewenangan desa mencakup:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota, tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah, kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangan diserahkan kepada desa. memiliki keleluasaan untuk mengalokasikan anggaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa (pembangunan) sesuai dengan kebutuhan di desa tersebut. Terlebih lagi saat ini, banyak sekali proyek-proyek pembangunan baik itu dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan dari lembaga donor yang memilih desa sebagai wilayah kerja proyeknya. Proyek-proyek berupa pembangunan fisik sarana prasarana, bantuan sosial hingga bantuan ekonomi sepatutnya menjadi energi pendorong tersendiri bagi desa untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan pembangunan desa. Namun demikian, pengelolaan potensi anggaran ini belum dapat dikoordinasikan dan dikelola dengan cukup baik oleh desa sehingga proyek-proyek tersebut dilaksanakan tidak terencana sebagai bagian dari rencana pembangunan desa yang lebih komprehensif.

Sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa bahwa landasan pemikiran pengaturan (tata kelola) mengenai desa yaitu:

- a. Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah 'desa' dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.
- c. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman.
- d. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa.

- e. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi luas yang dianut oleh UU No. 32/2004, Pemerintah hanya menjalankan lima kewenangan, dan diluar lima kewenangan itu menjadi kewenangan daerah. Dengan demikian konsepsi dasar yang dianut UU No. 32/2004, otonomi berhenti di kabupaten/kota. Kosekuensinya, pengaturan lebih jauh tentang desa dilakukan oleh kabupaten/kota, dimana kewenangan desa adalah kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa.

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam system pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Menurut ketentuan hukum yang berlaku, pemerintah desa sebagai dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, pembangunan maupun kemasyarakatan prinsipnya terdiri dari seorang kepala desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh aparatur/perangkat desa.

Hal ini perlu diperhatikan karna perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala desa.

E. Pembangunan Kecamatan

Penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan menghendaki terlaksananya sebagai kebijaksanaan dan program oleh seluruh badan pemerintahan. Berbagai pelaksanaan program dan pencapaian sasaran pembangunan yang ada merupakan kegiatan yang bersifat antara sector dan antara lembaga.

Dalam hal ini Kecamatan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan penyusunan program dan pembinaan pembangunan, pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi, pemberdayaan perempuan, lingkungan pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut (PP Nomor 25 tentang kecamatan)

1. Penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasara fisik
2. Penyusunan program dan pembinaan lingkungan hidup
3. Penyusunan program dan pembinaan perekonomian masyarakat desa/Camat produksi dan distribusi.

2.1.1.Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun secara berkelompok atau masyarakat. Untuk menyatukan mengingat konsep dasar pembangunan tersebut, maka strategi pembangunan nasional yang disusun oleh pemerintah provinsi adalah menyusun secara rinci

secara sektor dan strateginya sesuai dengan potensi, kecakapan, dan aspirasi lokal. Ibaratnya, strategi pembangunan nasional adalah menu yang lengkap untuk diberikan kepada masyarakat membangun di daerahnya untuk dapat memilih sesuai dengan prioritas pembangunan di daerahnya masing-masing. Secara sektoral, bidang-bidang pembangunan adalah ekonomi, politik, sosial budaya. Diluar itu, sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004, berdasarkan sektor yang dilakukan oleh pemerintah pusat, yaitu berhubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, hukum dan agama.

2.1.2.Otonomi Desa

Dalam membicarakan masalah otonomi, desa menjadi bagian tak terpisahkan. Otonomi desa yang dikenal sebagai hak yang dikenal untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pernyataan tentang derajat kebebasan didalam pengelolaan sumber daya alam yang bermamfaat dan sumber daya manusia yang ikut serta membangun desa. Kata “ desa” sendiri berasal dari bahasa india yakni “*swadesi*”(dalam Wasistono, 2007:7) yang berarti tempat asal, Tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.

Desa adalah suatu wilayah yang didiami sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umunya warganya hidup dari pertanian,

mempunyai hak mengatur rumah tangganya sendiri dan secara administratif berada dibawah pemerintahan kabupaten/kota (Nurcholis, 2011:4). Selanjutnya Soetadjo dalam Nurcholis (2011: 12) menjelaskan bahwa desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Menurut Widjaja (2003: 165), otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Kemudian dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, dijelaskan bahwa otonomi asli memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat 12, disebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat dipahami bahwa desa memiliki keistimewaan tersendiri. Karena jika dibandingkan dengan otonomi daerah propinsi, kabupaten/kota yang otominya diberikan oleh pemerintah atau secara formal melalui sistem desentralisasi sedangkan desa memiliki otonomi yang asli yang jauh lebih dulu telah ada sebelum negara ini ada. Data terakhir jumlah desa di Indonesia menurut Ditjen Administrasi Kependudukan Depdagri tahun 2007 (dalam Nurcholis, 2011:2) adalah 65. 189 desa sedangkan kelurahan berjumlah 7. 878 kelurahan. Ini artinya bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekitar 89 % berupa pemerintahan desa dan hanya sekitar 11 % berupa pemerintahan kelurahan yang bersifat perkotaan.

Berdasarkan data tersebut maka kedudukan desa sangat penting baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia. Sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran rill yang hendak disejahterakan sedangkan sebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan lembaga yang dapat memperkuat lembaga pemerintahan nasional karena sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa telah terbukti memiliki daya tahan luar biasa sepanjang keberadaannya. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa telah memiliki struktur kelembagaan yang mapan yang dihormati dan dilestarikan oleh masyarakat desa yang bersangkutan (Nurcholis,2011:2).

Keperluan otonomi desa, disamping memang sudah ada melekat pada desa bersangkutan, juga merupakan konsekwensi logis dari adanya perbedaan etnik, budaya dan tuntutan yang beraneka ragam dari masing-masing desa. Sehingga dengan adanya otonomi desa diperoleh kesempatan yang luas untuk mengetahui potensi sumber daya, masalah, kendala serta memperbesar akses setiap warga desa untuk berhubungan langsung dengan pemimpinnya ataupun sebaliknya memenuhi kebutuhan desa secara tepat (Awang, 2006:33).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa di luar desa genekologis yaitu dengan yang bersifat administratif ataupun alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

Selanjutnya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undanganyaitu :

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten /kota yang pengaturannya diserahkan kepada desa;
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota;

- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Landasan pemikiran mengenai pengaturan desa disebutkan dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 yaitu :

- a. Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.
- c. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman.
- d. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.

- e. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Desa merupakan subyek hukum, Talizuduhu Ndraha dalam Nurcholis (2011:21) menjelaskan bahwa desa yang otonom adalah desa yang merupakan subyek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan antara lain :

- a. Mengambil keputusan atau membuat peraturan yang dapat mengikat segenap warga desa atau pihak tertentu sepanjang menyangkut rumah tangganya;
- b. Menjalankan pemerintahan desa;
- c. Memilih kepala desa;
- d. Memiliki harta benda dari kekayaan sendiri;
- e. Memiliki tanah sendiri;
- f. Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri;
- g. Menyusun APPKD (Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Desa);

- h. Menyelenggarakan gotong royong;
- i. Menyelenggarakan peradilan desa;
- j. Menyelenggarakan usaha lain demi kesejahteraan desa.

Menurut Awang (2010:53) penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan kewenangan desa itu sendiri, baik untuk menetapkan suatu kebijakan maupun untuk melaksanakan kebijakan itu sendiri yang didasarkan pada kebutuhan, kepentingan dan aspirasi masyarakat lokal setempat. Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyatakan

dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggung jawaban yang dimaksud.

2.1.3. Pembangunan Desa

Pembangunan desa pada masa orde baru dilandasi Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1979, banyak referensi mengatakan bahwa pembangunan masa ini justru menghancurkan sendi-sendi kekuatan desa itu sendiri sebagai daerah yang otonom. Sebagai agen terdepan dan menyentuh serta berinteraksi langsung dengan masyarakat, desa harus benar-benar diperhatikan dengan melakukan pembangunan dan penguatan desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang mana desa selalu diidentikan dengan keterbelakangan.

Dalam Syafrudin (2010:32) dijelaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ini mendapatkan kritikan karena penyeragaman (Uniformitas), nama, bentuk, susunan dan kedudukan pemerintahan desa. Padahal, dalam merumuskan arah kebijakan (*legal policy*), pemerintahan desa perlu pengakuan dan penghormatan terhadap asal-usul yang bersifat istimewa pada eksistensi desa, yakni dengan memperbolehkan penggunaan nama seperti dusun, marga, nagari, meunasah, gampong, negorij dan lain sebagainya, yang bentuk, susunan maupun mekanisme pemerintahan didasarkan pada adat istiadatnya masing-masing. Sangat banyak keinginan yang menghendaki agar institusi yang disebut desa jangan diseragamkan karena keadaan desa-desa di Indonesia berbeda-beda, tidak bisa disamakan desa-desa di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya dan seterusnya.

Setelah reformasi bergulir UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang desa ini akhirnya digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengintegrasikan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dalam satu produk hukum. Undang-Undang ini lebih memberikan kesempatan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadatnya. Kurang lebih 5 tahun setelahnya lahirlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Subtansi Undang-Undang ini hampir sama dengan Undang-Undang sebelumnya. Keduanya telah menginternalisasi pemerintahan desa yang integral dari pemerintahan daerah dalam satu Undang-Undang. Menurut Syafrudin (2010:33) satu hal yang menarik tidak pernah dilakukan dan ada dalam sejarah hukum pemerintahan desa di Indonesia baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan adalah untuk pertama kalinya jabatan sekertaris desa diharuskan (diangkat) dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurut Ali Hanapiyah Muhi (2011:4) Pembangunan desa pada hakikatnya adalah segala bentuk aktivitas manusia (masyarakat dan pemerintah) di desa dalam membangun diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan di wilayah desa baik yang bersifat fisik, ekonomi, sosial, budaya, politik, ketertiban, pertahanan dan keamanan, agama dan pemerintahan yang dilakukan secara terencana dan membawa dampak positif terhadap kemajuan desa. Dengan demikian, pembangunan desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan

sumberdaya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi-organisasi/lembaga domestik maupun internasional untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik.

Berbicara tentang pembangunan desa terdapat dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan. Menurut Ali Hanapih Muhi (2011:4) secara umum, pembangunan desa meliputi dua aspek utama yaitu pembangunan desa dalam aspek fisik dan pembangunan dalam aspek pemberdayaan insani. Pembangunan desa dalam aspek fisik yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) di pedesaan seperti jalan desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan (*hardware* berupa sarana dan prasarana pendidikan, dan *software* berupa segala bentuk pengaturan, kurikulum dan metode pembelajaran), keolahragaan, dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut pembangunan desa.

Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insani yaitu pembangunan yang objek utamanya aspek pengembangan dan peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat di daerah pedesaan sebagai warga negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual, dan sebagainya. Tujuan utamanya adalah untuk membantu masyarakat yang masih tergolong marjinal agar dapat melepaskan diri dari berbagai belenggu keterbelakangan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insani ini selanjutnya disebut sebagai pemberdayaan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat menurut Widjaja (2005:169) adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Fungsi Pemerintah baik pusat, daerah maupun desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut terdiri dari pelayanan publik, pelayanan pembangunan dan pelayanan perlindungan. Pemberian pelayanan tersebut ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat (Nurcholis, 2011:103). Dalam konteks desa pencapaian tujuan pembangunan yang efektif bagi desa harus disertai dengan partisipasi masyarakatnya. Pemerintahan desa adalah pemerintahan yang memiliki hubungan lebih dekat dan harmonis dengan masyarakatnya. Mengingat masyarakat desa memiliki hubungan kekerabatan dan/atau hubungan sosial, ekonomi dan keamanan yang menciptakan ikatan lahir batin di antara masyarakatnya.

Selanjutnya Nurcholis (2011:104) menyatakan pelayanan pembangunan adalah pelayanan pemerintah desa dalam bentuk melakukan pembangunan yang berdampak pada peningkatan pendapatan warga desa baik langsung maupun tidak langsung. Menurut Widjaja (2005:95) setiap desa memiliki kondisi dan potensi yang khas berbeda dengan desa lainnya, demikian pula aspirasi dan karakter masyarakatnya oleh sebab itu pembangunan di desa memang sepatutnya lebih banyak ditentukan oleh masyarakat desa sendiri. Kedudukan pemerintah desa yang telah diberikan kewenangan penuh

untuk memberdayakan masyarakatnya sudah tentu harus mempunyai kemampuan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih mengedepankan hak-hak masyarakat. Dengan demikian, kedudukan kepala desa lebih merupakan wakil dari pemerintah desa dan masyarakat desa itu sendiri daripada sebagai wakil pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Oleh karena itu menurut Ali Hanapiah Muhi (2011:8) pembangunan desa dalam aspek pembangunan fisik, pembangunan prasarana dan sarana di daerah pedesaan semestinya menempatkan penduduk atau masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan menunjukkan bahwa masyarakat daerah pedesaan berperan sebagai pelaku pembangunan. Sudah semestinya masyarakat sebagai pelaku pembangunan mengambil posisi untuk berperan secara aktif dalam proses pembangunan. Peran aktif masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk keterlibatan atau pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan, apakah pada tahap pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan atau pada semua tahap proses pembangunan tersebut.

Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu hal yang penting bagi keberhasilan suatu kegiatan pembangunan yang menuju kepada kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat yang lebih baik. Wang (dalam Awang, 2006:61) mendefinisikan partisipasi sebagai proses kegiatan yang dilakukan oleh seorang ataupun oleh kelompok sebagai pernyataan kepentingan mereka untuk menyumbangkan tenaga dan sumber

daya lainnya kepada institusi sosial dan sistem yang mengatur kehidupan mereka.

Lebih jauh Wang mendefenisikan partisipasi terbagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut :

1. *Voluntary participation*; partisipasi secara sukarela dan parsipasi yang berasal dari masyarakat sendiri. Derajat partisipasi berkaitan dengan tingkat pendidikan warga masyarakat. artinya semakin tinggi tingkat pendidikan, maka partisipasi secara sukarela akan semakin tinggi pula.
2. *Induced participation*; partisipasi setengah-setengah yaitu sebagian berasal dari pemerintah dan sebagian lagi dari swadaya masyarakat.
3. *Forced participation*; partisipasi yang dipaksakan atau disebut juga dengan mobilisasi.

Kemudian Awang (2006:62) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa adalah keikutsertaan masyarakat dalam segala kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemamfaatan sampai pemeliharaan dan pengawasan yang diselenggarakan di desa dengan cara memberikan sumbangan baik berbentuk materil seperti uang, barang dan tenaga, maupun dalam bentuk spiritual seperti pemikiran dan gagasan.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong

royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Permendagri No 66 tahun 2007, karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedangkan partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

2.1.4. Peranan Kepala Desa

2.1.4.1 Pengertian Peranan

Peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1051) yaitu :bagian yang dimainkan seorang pemain (di film, sandiwara, dsb); tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Beberapa pengertian tentang peranan, pertama menurut Thoha (2006:10) peranan dirumuskan sebagai perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Menurut Soekanto (2005:212) peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Kemudian ia menyatakan pengertian peranan mencakup tiga hal yaitu :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dapat dipahami peranan ada karena adanya sebuah kedudukan ataupun posisi seseorang. Kedudukan yang dimaksud bisa dalam berbagai organisasi maupun struktur sosial. Kepala desa adalah seorang pemimpin. Dengan kedudukannya sebagai pemimpin ia diharapkan bisa menjalankan peran kepemimpinannya. Menurut Rivai (2006:148) Peran kepemimpinan dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin. Jadi dapat dinyatakan bahwa peranan kepala desa adalah perilaku yang teratur dan timbul karena kedudukan atau posisinya dalam memimpin desa

2.1.4.2 Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Kepala desa adalah unsur penyelenggara pemerintah desa yang berkedudukan sebagai pemimpin pemerintah desa. Sebagai pemimpin pilihan masyarakat, kepala desa tentunya memiliki kemampuan atau dianggap mampu oleh masyarakat dalam kepemimpinannya menjalankan roda pemerintahan di desa sebagaimana disebutkan dalam pasal 203 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang selanjutnya pelaksanaannya diatur dalam peraturan daerah.

Menurut George R. Terry dalam Kartono (2006:57) kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka suka berusaha mencapai tujuan kelompok. Orway Tead menyatakan kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya Howard H. Hoyt mendefenisikan kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi tingkah laku manusia, kemampuan untuk membimbing orang.

Kemudian Kartono (2006:57) menyimpulkan bahwa kepemimpinan itu terdapat unsur-unsur yaitu :

- a. Kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau orang lain;
- b. Kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau orang lain;
- c. Untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok.

Menurut Thoha (2006:121) kepemimpinan adalah aktifitas untuk memepengaruhi prilaku orang lain agar mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.Orang yang menjalankan kepemimpinan selanjutnya disebut pemimpin.Pemimpin memiliki peranan penting dalam suksesnya pencapaian tujuan suatu kelompok/ organisasi. Oleh karenanya Kartini Kartono dalam Pasolong (2011:114) kepemimpinan itu harus selalu dikaitkan dengan tiga hal penting yaitu :

- a. Kekuasaan yaitu otoritas dan legalitas yang memberikan kewenangan kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu;

- b. Kelebihan, keunggulan, keutamaan sehingga orang mampu mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh pada pemimpin dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu;
- c. Kemampuan, yaitu segala daya, kesanggupan, kekuatan dan kecakapan/keterampilan teknis maupun sosial yang dianggap melebihi dari kemampuan anggota biasa.

Menurut Widjaja (2005:31) kepemimpinan secara umum merupakan kemampuan seseorang (pemimpin) untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain tersebut bertindak laku sebagaimana yang dikehendaki pemimpin tersebut. Kepemimpinan kepala desa pada dasarnya bagaimana kepala desa dapat mengoordinasi seluruh kepentingan masyarakat desa dalam setiap pengambilan keputusan. Kepala desa akan berhasil apabila dalam kepemimpinannya memerhatikan suara masyarakat yang dipimpin secara demokratis yaitu mencerminkan keterbukaan, bertanggung jawab dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada hasil kesepakatan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya kepala desa mempunyai peranan yang sangat penting terhadap berhasil atau tidaknya pembangunan suatu desa. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang diatur kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 04 tahun 2010 kepala desa mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, yaitu pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa;

- b. Menyelenggarakan urusan pembangunan, yaitu pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umumdesa;
- c. Urusan administrasi umum dan keuangan, yaitu melaksanakan pengendalian surat-surat masuk dan keluar serta pencatatan administrasi keuangan desa;
- d. Menyelenggarakan urusan kesejahteraan masyarakat,yaitu pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, kepala desa mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud, kepala desa mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;

- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Kepala desa dilarang melakukan tindakan yang telah dilarang peraturan perundang-undangan yaitu :

- a. Menjadi pengurus partai politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menyalahgunakan wewenang; dan
- h. Melanggar sumpah/janji jabatan.

Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan

berikutnya. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat, yang diterapkan dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Kepala desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat. Kepada BPD, kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.

Dapat dipahami akan beratnya tugas dan pentingnya kedudukan kepala desa dalam sebuah desa. Kemampuan kepemimpinan kepala desa cukup menentukan akan keberhasilan desa dalam pembangunan di berbagai aspek kehidupan. Oleh karenanya kepala desa harus mempunyai sifat yang mencerminkan jiwa kepemimpinan yang baik.

Menurut Kartono (2006:328) sifat-sifat kepemimpinan yang unggul adalah berani, tegas, kaya akan inisiatif, peka terhadap lingkungan dan bawahan, mampu menjalin komunikasi yang akrab, berani mengambil keputusan dan resiko, bertanggung jawab dan konsekuen, bersikap terbuka, jujur dan mempunyai prinsip-prinsip yang teguh.

Kepemimpinan memiliki fungsi-fungsi dalam usaha untuk pencapaian tujuan. Menurut Rivai (2006:53) fungsi artinya jabatan (Pekerjaan) yang

dilakukan atau kegunaan sesuatu hal atau kerja suatu bagian tubuh. Sedangkan fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial. Selanjutnya fungsi kepemimpinan diselenggarakan dalam aktifitas kepemimpinan secara integral pelaksanaannya berlangsung sebagai berikut :

- a. Pemimpin berkewajiban menjabarkan program;
- b. Pemimpin harus mampu memberikan petunjuk yang jelas;
- c. Pemimpin harus berusaha mengembangkan kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat;
- d. Pemimpin harus mengembangkan kerjasama yang harmonis;
- e. Pemimpin harus mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan masalah sesuai batas tanggung jawab masing-masing;
- f. Pemimpin harus berusaha menumbuhkan kembangkan kemampuan memikul tanggung jawab;
- g. Pemimpin harus mendayagunakan pengawasan sebagai alat pengendali.

Koordinasi merupakan konsep dasar kedua disamping kepemimpinan, sebab koordinasi dan kepemimpinan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena saling mempengaruhi. Koordinasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka proses pencapaian tujuan organisasi. Handoko (dalam Awang, 2010:185) mengemukakan bahwa koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Demikian juga yang diungkapkan Stower (dalam Awang, 2010:185) bahwa koordinasi

adalah proses penyatupaduan sasaran dan kegiatan dari unit-unit yang terpisah dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

2.2. Hipotesa

Berdasarkan uraian yang telah dibuat di atas maka dapat ditarik hipotesa penelitian ini yaitu ;

” Diduga Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan belum berjalan dengan efektif ”

2.3. Variabel Penelitian yang terdiri dari :

Pelaksanaan Pembangunan Fisik

2.4. Konsep operasional terdiri dari:

1. Pelaksanaan Pembangunan Fisik;
 - a. Sebagai pedoman pelaksanaan.
 - b. Sebagai alat pengendalian.
 - c. Sebagai alat pengawasan.
 - d. Sebagai alat penilaian.
 - e. Sebagai ukuran untuk mengetahui sasaran.
 - f. Sebagai ukuran untuk mengetahui tujuan yang telah ditentukan.
 - g. Untuk memperoleh daya guna.
 - h. Untuk memperoleh hasil guna yang optimal.
 - i. Sebagai alat untuk memberikan suatu keyakinan.
 - j. Sebagai alat untuk memberikan suatu pendapat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Alasan penulis melakukan penelitian disebabkan karena efisiensi kerja aparaturnya pemerintahannya relatif kurang efisien dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dengan di dasarkan pada pengetahuan akan situasi dan kondisi, sehingga akan memudahkan penulis untuk memahami dan menganalisis fenomena-fenomena yang ada.

3.2. Waktu Penelitian

penelitian yang dilakukan penulis pada Mei 2013 hingga selesainya penelitian ini.

3.3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, misalnya dari individu atau perseorangan (Umar, 2002:84). Adapun data tersebut dalam penelitian ini berupa tanggapan responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun teknik dokumentasi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang dapat menunjang aspek yang diteliti di desa. Mengenai data yang diperoleh dari dan

yang tersedia di desa yaitu data aparat pemerintahan desa, struktur organisasi dan profil Desa Kuala Terusan.

3.4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010 : 90). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh masyarakat desa berdasarkan KK (Kartu Keluarga) di Desa Kuala Terusan. Data tahun 2013 menunjukkan jumlah KK di Desa Kuala Terusan adalah 213 KK.

b. Sampel

Menurut Sugiyono (2010:91) Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki populasi. Adapun tehnik sampel data penelitian ini menggunakan sampel acak (*random sampling*). Untuk menentukan berapa sampel yang dibutuhkan, penulis menggunakan rumus Slovin dalam penghitungan sampel (dalam Umar, 2002:141) dengan kelonggaran ketidaktelitian sebesar 10%. Adapun penghitungannya adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{663}{1 + 663(10\%)^2}$$

$$n = \frac{663}{1 + 663(0.01)}$$

$$n = \frac{663}{7.63}$$

$$n = 86,89$$

$$n = 87$$

Keterangan : n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = error 10% (Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel).

Jadi, dari hitungan jumlah populasi dari masyarakat berdasarkan KK adalah 213 KK, dengan kelonggaran ketidaktelitian 10%, maka hasil penghitungan dengan menggunakan rumus Slovin tersebut didapat sampel sebanyak 68,05. Menurut Usman (2006:11) jika pecahan yang akan dibulatkan itu lebih dari 0,05 maka pecahan tersebut dibulatkan menjadi 1. Dengan demikian maka jumlah sampel yang penulis ambil dari populasi masyarakat berdasarkan jumlah KK adalah 68,05 yang dibulatkan menjadi 68 orang.

Adapun jumlah populasi dan sampel pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.1
Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian

No.	Tehnik Pengumpulan Data	Subjek Penelitian	Populasi	Sampel
1.	Kuisoner/ Angket	Masyarakat berdasarkan jumlah KK	213	68

2.	Wawancara (key Informan)	a. Kepala desa b. Sekertaris Desa c. Ketua BPD d. Tokoh masyarakat	1 1 1 2	
----	--------------------------	---	------------------	--

Sumber : Data Olahan 2013

3.4 Teknik pengumpulan Data

a. Angket (kuesioner)

Angket (kuesioner) adalah suatu cara pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan mereka akan memberikan respons terhadap pertanyaan tersebut (Umar, 2002:92). Adapun responden yang dimaksud adalah seluruh sampel masyarakat Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan berdasarkan pada jumlah KK.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan (Norbuko, 2010:83). Adapun yang diwawancarai adalah kepala desa, Sekdes, ketua BPD dan 2 orang tokoh masyarakat yang diambil dari masing-masing dusun di Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sebagai key Informen pada penelitian ini.

1.5 Analisa Data

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan secara utuh dan nyata keadaan objek yang diteliti kemudian dituangkan kedalam tabel-tabel dengan angka dan persentase dan selanjutnya dianalisa.

b. Rumus Statistik

Dalam menganalisis penulis akan menuangkannya dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan persentase dengan rumusan sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Total Jumlah

c. Skala Pengukuran

Menurut Sugiyono (2010:105) skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Adapun pada penelitian ini penulis menggunakan interval yang didistribusikan

kedalam bentuk persen (dalam Usman, 2009:146) dengan alternatif sangat baik sampai dengan tidak baik.

Klasifikasi	Skor	% Interval
Sangat Baik	5	81%-100%
Baik	4	61%-80%
Ragu-Ragu	3	41%-60%
Kurang Baik	2	21%-40%
Tidak Baik	1	0%-20%

$$\begin{aligned}
 \text{Interval} &= \frac{\text{Nilai \% Max} - \text{Nilai \% Min}}{\text{Jumlah Kelas}} \\
 &= \frac{100 \% - 0 \%}{5} \\
 &= 20
 \end{aligned}$$

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Letak Geografis Kecamatan pangkalan Kerinci

Kecamatan Pangkalan Kerinci terletak di hilir sungai Kampar yang berada di Kabupaten Pelalawan. Kecamatan ini terletak antara 1°25" LU dan 0°,20" LS serta antara 100°,42" ~ 103°,28" BT dengan batas-batas wilayah:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Kuras
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Langgam
- c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Bandar Sekijang
- d. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Pelalawan

Luas wilayah Kecamatan Pangkalan Kerinci pada saat ini adalah 65 KM yang terdiri dari kelurahan dan desa. Adapun kelurahan dan desa itu antara lain:

1. Kelurahan Kerinci Kota
2. Kelurahan Kerinci Barat
3. Kelurahan Kerinci Timur
4. Desa Kuala Terusan
5. Desa Mekar Jaya
6. Desa Rantau baru
7. Desa Makmur

4.2. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Pangkalan kerinci

Secara terperinci struktur organisasi Kecamatan Pangkalan kerinci dapat dilihat pada gambar berikut ini :

1. Susunan Organisasi Kecamatan

A. Camat mempunyai tugas:

1. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan pemerintahan camat.
2. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.
3. Pembinaan pembangunan masyarakat meliputi pembinaan sarana dan prasarana perekonomian, proksi dan pembinaan pembangunan pada umumnya serta pembinaan lingkungan hidup.
4. Pembinaan kesejahteraan sosial.
5. Penyusunan rencana dan program, pembinaan administrasi, ketatatusahaan dan rumah tangga.

B. Sekretaris kecamatan mempunyai tugas:

1. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya.
2. Merumuskan dan melaksanakan urusan administrasi keuangan.
3. Merumuskan dan melaksanakan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

C. Seksi pemerintahan mempunyai tugas:

1. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program penyusunan program penyelenggaraan pemerintahan umum dan kepala desa.

2. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
3. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa.

D. Seksi pembangunan masyarakat mempunyai tugas :

1. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dan pembinaan perekonomian camat dan distribusi.
2. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dan pembinaan lingkungan hidup.
3. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa.

E. Seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas :

1. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program, pembinaan pelayanan dan bantuan social, pembinan kepemudaan, pera-an wanita dan olahraga.
2. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan dan melaksanakan penyusunan program, pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat.

F. Seksi pelayanan umum mempunyai tugas :

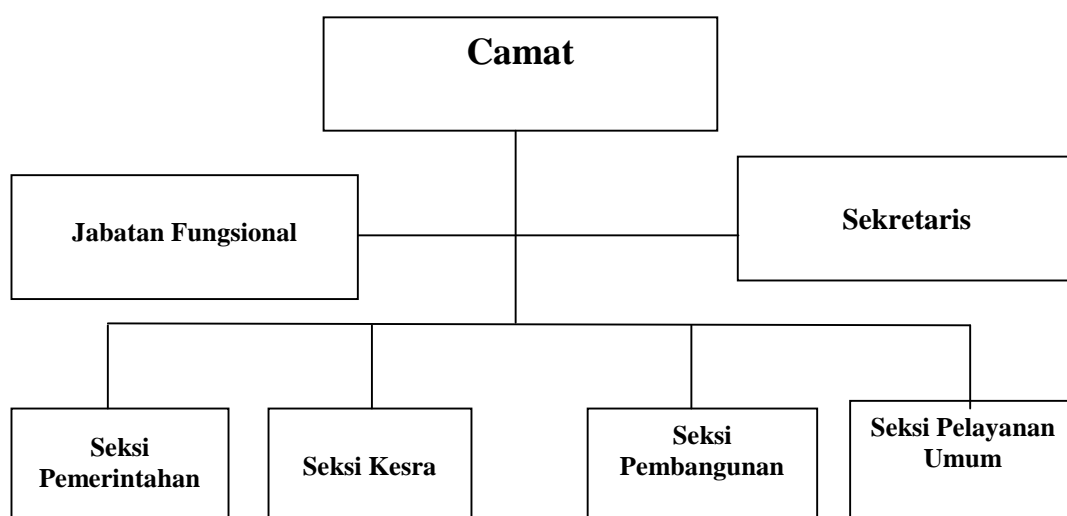
1. Mermuskan dan melaksanakan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi kepala desa.

2. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi.
3. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum.

Dalam menyelenggarakan tugas-tugas dan fungsinya, kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD (Badan Perwakilan Desa) yang merupakan pemerintahan desa, terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan desa.

Bagan struktur organisasi Kecamatan Pangkalan Kerinci diperagakan melalui gambar IV.1:

Gambar IV.I. Bagan Stuktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan



Sumber : Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, 2011

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

5.1 Identitas Responden

5.1.1 Jenis Kelamin Responden

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai identitas responden berikut ini penulis akan menguraikan mengenai identitas responden menurut jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.1
Jenis Kelamin Responden

No	Jenis kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Laki-Laki	44	64,70
2.	Perempuan	24	35,30
Jumlah		68	100 %

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah sampel untuk responden sebanyak 68 orang, yang keseluruhannya terdiri dari 44 responden laki-laki atau 64.70%, sedangkan responden perempuan sebanyak 24 responden atau 35.30%. Jadi jumlah keseluruhan jumlah responden yang dijadikan sampel dari masyarakat Desa Kuala terusan adalah 68 orang.

Dari uraian diatas, terlihat bahwa sebagian besar responden adalah berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 44 orang atau 64,70%, dan kebanyakan responden yang diambil untuk sampel penelitian ini adalah dari kepala keluarga. Alasan penulis lebih banyak mengambil sampel laki-laki karena laki-laki lebih banyak bergerak serta turut aktif dalam kegiatan-kegiatan seperti gotong royong dan musyawarah desa.

5.1.2 Umur Responden

Untuk mengetahui tingkat umur responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.2
Tingkat Umur Responden

No	Tingkat Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1.	17 - 25 Tahun	21	30,89
2.	26 - 34 Tahun	23	33,82
3.	35 - 43 Tahun	16	23,53
4.	44 Tahun keatas	8	11,76
Jumlah		68	100 %

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2013

Dari data diatas dapat dilihat bahwa tingkat umur responden terbanyak adalah pada tingkat umur 26-34 tahun yaitu sebanyak 23 responden atau 30,89%. Tingkat umur 17-25 sebanyak 21 responden atau 30,89%, kemudian tingkat umur 35-43 sebanyak 16 responden atau 23,53%, dan tingkat umur 44 tahun keatas berjumlah 8 responden atau 11,76%.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa tingkat umur responden sudah cukup dewasa dalam memberikan tanggapan-tanggapannya terhadap pertanyaan dalam kuisisioner penelitian ini, sebab menurut penulis kedewasaan umur dapat memberikan isyarat terhadap kemampuan dari seseorang dalam menilai dan memutuskan suatu permasalahan dengan jalan pikir yang lebih matang dan lebih bijak, karena umur berhubungan dengan seberapa banyak pengalaman yang mereka peroleh.

5.1.3 Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan sangat diperlukan dalam pembangunan, karena dengan pendidikanlah sumber daya manusianya akan berkualitas. Untuk mengetahui

gambaran dan tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.3
Tingkat Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tamat SD	7	10,29
2	Tamat SLTP / Sederajat	18	26,48
3	Tamat SLTA / Sederajat	27	39,70
4	Sarjana (S1)	16	23,53
Jumlah		68	100 %

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2013

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan responden yang terpilih dalam penelitian ini adalah 68 responden dengan berbagai tingkatan pendidikan yaitu, yang mempunyai latar belakang tamat SD sebanyak 7 orang responden atau 10,29%, tamatan SLTP sebanyak 18 responden atau 26,48%, tamatan SLTA 27 responden atau 39,70%, dan yang mempunyai latar belakang lulusan Perguruan Tinggi atau sarjana sebanyak 16 responden atau 23,53%.

Dari penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa secara umum tingkat pendidikan responden sudah dapat dikatakan baik karena mayoritas responden paling tidak sudah mengenyam pendidikan di SD yaitu responden yang termasuk dalam kategori umur 44 tahun keatas. Namun demikian, variasi tingkat pendidikan responden sudah cukup baik karena mencakup seluruh tingkat pendidikan yakni mulai dari tingkat SD, SLTP, SLTA dan ada juga yang Perguruan Tinggi.

5.2 . Pelaksanaan Pembangunan

Penyelenggaraan pemerintahan selain bertujuan melaksanakan program pembangunan dan pelayanan pada masyarakat disatu sisi ,menjadi tanggung jawab pemerintah namun pada sisi lain sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah membina masyarakat dan pemerintah saling begandengtangan dalam memikul tanggungjawab dalam mensejahterakan masyarakat.

Masalah sumber daya manusia mendapat perhatian secarta khusus, terutama yang berkaitan dengan kualitas, sikap dan tingkah laku, dengan kualitas dan kinerja yang tinggi maka berbagi potensi yang ada dalam masyarakat dapat di manfaatkan bagi sebesar-besarnya kepentingan masyarakat.

Table V.4. Tanggapan Responden Tentang Peran Perencanaan Sebagai Pedoman Pelaksanaan Pembangunan

No	Kategori jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat baik	22	32,35
2	Baik	11	16,17
3	Ragu-ragu	16	23,52
4	Kurang Baik	10	14,70
5	Tidak baik	9	13,23
	Jumlah	68	100%

Sumber : data olahan lapangan 2013

Dari data tabel di atas maka diketahui peran perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dapat dikatakan “sangat baik” karena dari 68 responden maka yang menyatakan “sangat baik” ada sebanyak 22 orang atau (32,35%) yang disebabkan dalam melaksanakan setiap pembangunan di kecamatan atau di desa telah mempunyai pedoman yang jelas untuk kegiatannya, selain itu yang menyatakan “baik” ada sebanyak 11 orang atau (16,17%) yang

disebabkan kegiatan pembangunan telah baik dalam perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dan yang menyatakan “ragu-ragu” ada sebanyak 16 orang atau (23,52%) dan yang menyatakan “kurang baik” ada sebanyak 10 responden atau (14,70%) dan “tidak baik” ada sebanyak 9 responden atau (13,23%).

Table V.5. Tanggapan Responden Tentang Peran Perencanaan Sebagai Alat Pengendalian Dalam Pelaksanaan Pembangunan

No	Kategori jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat baik	17	25
2	Baik	15	22,05
3	Ragu-ragu	22	32,35
4	Kurang Baik	7	10,29
5	Tidak baik	7	10,29
	Jumlah	68	100%

Sumber : data olahan lapangan 2011

Dari data tabel diatas maka diketahui peran perencanaan sebagai alat pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan dapat dikatakan “ragu-ragu” karena dari 68 responden maka yang menyatakan “sangat baik” ada sebanyak 17 orang atau (25%) yang disebabkan dalam melaksanakan setiap pembangunan di kecamatan atau di desa telah sesuai dengan peran perencanaan sebagai alat pengendali dalam pelaksanaan pembangunan, selain itu yang menyatakan “baik” ada sebanyak 15 orang atau (22,05%) yang disebabkan kegiatan camat telah baik dalam perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dan yang menyatakan “ragu-ragu” ada sebanyak 22 orang atau (32,35%) dan yang menyatakan “kurang baik” ada sebanyak 7 responden atau (10,29 %) dan yang menyatakan “tidak baik” ada sebanyak 7 responden atau (10,29 %).

Table V.6. Tanggapan Responden Tentang Peran Perencanaan Sebagai Alat Pengawasan Dalam Pelaksanaan Pembangunan

No	Kategori jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat baik	16	23,52
2	Baik	10	14,70
3	Ragu-ragu	22	32,35
4	Kurang Baik	11	16,17
5	Tidak baik	9	13,23
	Jumlah	68	100%

Sumber : data olahan lapangan 2013

Dari data tabel diatas maka diketahui peran perencanaan sebagai alat pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan dapat dikatakan “ragu-ragu” karena dari 68 responden maka yang menyatakan “sangat baik” ada sebanyak 16 orang atau (23,52%) yang disebabkan dalam melaksanakan setiap pembangunan di kecamatan atau di desa pengawasanya kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya, selain itu yang menyatakan “baik” ada sebanyak 10 orang atau (14,70%) dan yang menyatakan ragu-ragu ada sebanyak 22 orang atau (32,35%) dan yang menyatakan kurang baik ada sebanyak 11 responden atau (16,17%) dan yang menyatakan tidak baik ada sebanyak 9 responden atau (13,23%).

Table V.7. Tanggapan Responden Tentang Peran Perencanaan sebagai Alat Penilaian dalam Pelaksanaan Pembangunan

No	Kategori jawaban	Jumlah	Persentase
----	------------------	--------	------------

1	Sangat baik	17	25
2	Baik	19	27,94
3	Ragu-ragu	10	14,70
4	Kurang Baik	14	20,58
5	Tidak baik	8	11,76
	Jumlah	68	100%

Sumber : data olahan lapangan 2013

Dari data tabel di atas maka diketahui peran perencanaan sebagai alat penilaian dalam pelaksanaan pembangunan dapat dikatakan “baik” karena dari 68 responden maka yang menyatakan “sangat baik” ada sebanyak 17 orang atau (25%) yang disebabkan dalam melaksanakan setiap pembangunan di kecamatan atau di desa telah sesuai dengan perencanaan pembangunan, selain itu yang menyatakan “baik” ada sebanyak 19 orang atau (27,94%) yang disebabkan kegiatan badan perencanaan pembangunan daerah telah baik dalam perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dan yang menyatakan “ragu-ragu” ada sebanyak 10 orang atau (14,70%) dan yang menyatakan “kurang baik” ada sebanyak 14 responden atau (20,58 %) dan yang menyatakan “tidak baik” ada sebanyak 8 responden atau (11,76%).

Table V.8. Tanggapan Responden Tentang Peran Perencanaan sebagai Ukuran Untuk Mengetahui Sasaran dalam Pelaksanaan Pembangunan

No	Kategori jawaban		
----	------------------	--	--

		Jumlah	Persentase
1	Sangat baik	11	16,17
2	Baik	15	22,05
3	Ragu-ragu	16	27,94
4	Kurang Baik	11	16,17
5	Tidak baik	12	17,64
	Jumlah	68	100%

Sumber : data olahan lapangan 2013

Dari data tabel di atas maka diketahui peran perencanaan sebagai ukuran untuk mengetahui sasaran dalam pelaksanaan pembangunan dapat dikatakan “ragu-ragu” karena dari 68 responden maka yang menyatakan sangat baik ada sebanyak 11 orang atau (16,17 %) yang disebabkan camat dalam melaksanakan setiap pembangunan di kecamatan atau di desa telah sesuai dengan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan, selain itu yang menyatakan “baik” ada sebanyak 15 orang atau (21,05%) dan yang menyatakan “ragu-ragu” ada sebanyak 19 orang atau (27,94%) dan yang menyatakan “kurang baik” ada sebanyak 11 responden atau (16,17 %) dan yang menyatakan “tidak baik” ada sebanyak 12 responden atau (17,64%).

Table V.9. Tanggapan Responden Tentang Peran Perencanaan Sebagai Ukuran Untuk Mengetahui Tujuan Yang Telah Ditentukan

No	Kategori jawaban		
-----------	-------------------------	--	--

		Jumlah	Persentase
1	Sangat baik	16	23,52
2	Baik	10	14,70
3	Ragu-ragu	22	32,35
4	Kurang Baik	11	16,17
5	Tidak baik	9	13,23
	Jumlah	68	100%

Sumber : data olahan lapangan 2013

Dari data tabel di atas maka diketahui peran perencanaan sebagai ukuran untuk mengetahui tujuan yang telah ditentukan dapat dikatakan “ragu-ragu” karena dari 68 responden maka yang menyatakan “sangat baik” ada sebanyak 16 orang atau (23,52%) yang disebabkan dalam melaksanakan setiap pembangunan di kecamatan atau di desa kurang efektif dalam menentukan ukuran dalam dan tujuan pembangunan, selain itu yang menyatakan “baik” ada sebanyak 10 orang atau (14,70%) dan yang menyatakan “ragu-ragu” ada sebanyak 22 orang atau (32,35%) dan yang menyatakan “kurang baik” ada sebanyak 11 responden atau (16,17%) dan yang menyatakan “tidak baik” ada sebanyak 9 responden atau (13,23%).

Table V.10. Tanggapan Responden Tentang Peran Perencanaan untuk Memperoleh Daya Guna yang Dibutuhkan untuk Keperluan Pembangunan

No	Kategori jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat baik	22	32,35
2	Baik	11	16,17
3	Ragu-ragu	16	23,52
4	Kurang Baik	10	14,70
5	Tidak baik	9	13,23
	Jumlah	68	100%

Sumber : data olahan lapangan 2011

Dari data tabel di atas maka diketahui peran perencanaan sebagai ukuran untuk mengetahui sasaran dalam pelaksanaan pembangunan dapat dikatakan “sangat baik” karena dari 68 responden maka yang menyatakan sangat baik ada sebanyak 22 orang atau (32,35%) yang disebabkan dalam melaksanakan setiap pembangunan di kecamatan atau di desa telah mempunyai pedoman yang jelas untuk kegiatannya, selain itu yang menyatakan “baik” ada sebanyak 11 orang atau (16,17%) dan yang menyatakan “ragu-ragu” ada sebanyak 16 orang atau (23,52%) dan yang menyatakan “kurang baik” ada sebanyak 10 responden atau (14,70%) dan yang menyatakan “tidak baik” ada sebanyak 9 responden atau (13,23%).

Table V.11. Tanggapan Responden Tentang Peran Perencanaan untuk Memperoleh Hasil Guna yang Optimal dalam Pembangunan

No	Kategori jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat baik	11	16,17
2	Baik	11	16,17
3	Ragu-ragu	12	17,64
4	Kurang Baik	19	27,94
5	Tidak baik	15	22,05
	Jumlah	68	100%

Sumber : data olahan lapangan 2013

Dari data tabel di atas maka diketahui peran perencanaan sebagai ukuran untuk mengetahui sasaran dalam pelaksanaan pembangunan dapat dikatakan “kurang baik” karena dari 68 responden maka yang menyatakan “sangat baik” ada sebanyak 11 orang atau (16,17%) yang disebabkan dalam melaksanakan setiap pembangunan di kecamatan atau di desa tidak sesuai dengan kebutuhan yang di perlukan masyarakat. yang menyatakan “baik” ada sebanyak 11 orang atau (16,17%) yang menyatakan “ragu-ragu” ada sebanyak 12 orang atau (17,64%) dan yang menyatakan “kurang baik” ada sebanyak 19 responden atau (27,94%) dan yang menyatakan “tidak baik” ada sebanyak 15 responden atau (22,05%).

Table V.12. Tanggapan responden tentang peran perencanaan sebagai alat untuk memberikan suatu keyakinan Dalam Pembangunan

No	Kategori jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat baik	10	14,70
2	Baik	14	20,58
3	Ragu-ragu	8	11,76
4	Kurang Baik	17	25
5	Tidak baik	19	27,94
	Jumlah	68	100%

Sumber : data Olahan lapangan 2013

Dari data tabel di atas maka diketahui peran perencanaan sebagai alat untuk memberikan suatu keyakinan dalam pembangunan dapat dikatakan “tidak baik” karena dari 68 responden maka yang menyatakan sangat “baik” ada sebanyak 10 orang atau (14,70%) yang disebabkan masyarakat tidak yakin akan peran Camat dalam melaksanakan setiap perencanaan pembangunan di kecamatan atau di desa, selain itu yang menyatakan “baik” ada sebanyak 14 orang atau (20,58%) dan yang menyatakan “ragu-ragu” ada sebanyak 8 orang atau (11,76%) dan kurang “kurang baik” ada sebanyak 17 responden atau (25%) dan yang menyatakan “tidak baik” ada sebanyak 19 responden atau (27,94%).

Table V.13. Tanggapan Responden Tentang Peran Perencanaan Sebagai Alat Untuk Memberikan Suatu Pendapat dalam Perencanaan Pembangunan

No	Kategori jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat baik	12	17,64
2	Baik	11	16,17
3	Ragu-ragu	22	32,35
4	Kurang Baik	11	16,17
5	Tidak baik	12	17,64
	Jumlah	68	100%

Sumber : data Olahan lapangan 2013

Dari data tabel di atas maka diketahui peran perencanaan sebagai alat untuk memberikan suatu pendapat dalam pelaksanaan pembangunan dapat dikatakan “ragu-ragu”. karena dari 68 responden maka yang menyatakan “sangat baik” ada sebanyak 12 orang atau (17,64%) yang disebabkan masyarakat ragu akan peran Camat dalam memberikan pendapat dalam perencanaan pembangunan baik di kecamatan atau di desa, selain itu yang menyatakan “baik” ada sebanyak 11 orang atau (16,17%) dan yang menyatakan “ragu-ragu” ada sebanyak 22 orang atau (32,35 %) dan yang menyatakan “kurang baik” ada sebanyak 11 responden atau (16,17%) dan menyatakan “tidak baik” ada sebanyak 12 responden atau (17,64%).

Maka selanjutnya disini akan diuraikan secara terperinci mengenai Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam perencanaan pembangunan fisik di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. yaitu :

Suatu rencana kerja yang baik tentu harus diawali dengan berbagai informasi terutama dari mereka yang akan dijadikan objek dari pembangunan itu sendiri. Hal ini diperlukan bila pembangunan untuk masyarakat maka keinginan masyarakatlah yang harus dijadikan acuan bagi penyusunan berbagai program pembangunan desa dan kecamatan. Menyadari tingkat pengetahuan masyarakat relatif rendah karena itu pembinaan dari camat, kepala desa, dan pegawai pemerintahan. Peran pemerintah sangat di perlukan terutama melalui pembinaan atau bimbingan bagi masyarakat yang ada.

Kemudian untuk mengetahui tanggapan responden dari tabel yang ada penulis akan merekap ulang tabel yang membahas tentang peran perencanaan tersebut menjadi satu supaya bisa dimengerti. Adapun tanggapan responden tentang 10 pertanyaan yang peneliti ajukan. dapat dilihat seperti pada tabel berikut ini :

Tabel V.14. Tanggapan Responden Peran Perencanaan dalam Pelaksanaan Pembangunan

No	Peran perencanaan	Tanggapan responden					Jumlah
		A	B	C	D	E	
1	- Sebagai pedoman pelaksanaan	22	11	16	10	9	68
2	- Sebagai alat pengendalian	17	15	21	7	8	68
3	- Sebagai alat pengawasan	16	10	22	11	9	68
4	- Sebagai alat penilaian	17	19	10	14	8	68
5	- Sebagai ukuran untuk mengetahui sasaran	11	15	19	11	12	68
6	- Sebagai ukuran untuk mengetahui tujuan yang telah ditentukan	16	10	22	11	9	68
7	- Untuk memperoleh daya guna	22	11	16	10	9	68
8	- Untuk memperoleh hasil guna yang optimal	11	11	12	19	15	68
9	- Sebagai alat untuk memberikan suatu keyakinan	10	14	8	17	19	68
10	- Sebagai alat untuk memberikan suatu pendapat	12	11	22	11	12	68
	Jumlah	154	127	168	121	110	680
	Persentase	22,65%	18,68%	24,70%	17,79%	16,18%	100%

Sumber, Data olahan penelitian 2013

Dari hasil tabel rekapitulasi jawaban responden diatas mengenai pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang menyatakan “ sangat baik” ada sebanyak 22,65%% dari keseluruhan jumlah responden sebanyak 68 orang karena selama ini telah menetapkan peranan perancangan dalam pembangunan di Kecamatan.

Tanggapan responden “baik” ada sebanyak 18,68%, Sedangkan yang meyatakan “ragu-ragu” ada sebanyak 24,70%, yang menyatakan “kurang baik” ada sebanyak 17,79%, Selanjutnya yang menyatakan tidak baik ada sebanyak 16,18%.

Selanjutnya rekapitulasi keseluruhan dapat diolah dengan menggunakan rumus :

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

$$A = 5 \times 154 = 770$$

$$B = 4 \times 127 = 508$$

$$C = 3 \times 160 = 504$$

$$D = 2 \times 121 = 242$$

$$E = 1 \times 110 = 110 +$$

$$\text{Total Frekuensi} \quad 2134$$

$$N = 680 \times 5 = 3400$$

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

$$P = \frac{2134}{3400} \times 100\%$$

$$P = 62,76$$

Dari uraian diatas maka diketahui peran perencanaan yang dilakukan Desa dalam kategori “ **Baik** ” hal ini sesuai dengan hasil rekapitulasi jawaban responden secara keseluruhan sebesar **62,76 %** atau berada pada jarak interval 61% - 80%. peran perencanaan dapat dikatakan baik karena dalam pembangunan ini bisa sebagai alat untuk meyakinkan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, walaupun masih banyak terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan di Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

5.3 Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Dalam menjalankan fungsinya ini banyak hambatan pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan antara lain yaitu :

- a. Kurangnya anggaran yang disediakan oleh Kecamatan sehingga membatasi kegiatan pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya.
- b. Tidak dipahaminya instruksi yang diberikan camat seperti instruksi mengenai penanganan anggaran yang selalu di salah mengerti oleh kepala desa yang ada, hal ini terlihat dalam pelaksanaan pembanguna sering kekurangan anggaran jadinya dan tidak sesuai dengan rencana .
- c. Tidak adanya rencana yang jelas dari camat terhadap desa dalam pelaksanaan pembanguna ini sehingga sering terjadi dualisme kebijakan dalam pelaksanaanya.

5.3. Beberapa Alasan Desa Tidak Dapat Merealisasikan Pembangunan yang di Usulkan Masyarakat

Dari berbagai usulan pembangunan yang di ajukan oleh masyarakat melalui Desa kepada Camat maka diketahui tidak seluruh aspirasi atau usulan tersebut bisa di jalanka atau di kabulkan oleh pemerintah hal ini disebabkan oleh beberapa alasan antara lain :

- a. Camat dalam merealisasikan usulan pembangunan melihat terlebih dahulu usulan mana yang dianggap lebih bermanfaat pada masyarakat
- b. Camat dalam merealisasikan usulan pembangunan juga melihat dari pada anggaran yang tersedia apakah anggaran yang tersedia cukup untuk setiap usulan yang di ajukan desa/kelurahan
- c. Camat mempertimbangkan usulan pembangunan dari desa dengan melihat kemampuan dari desa/kelurahan apakah bisa untuk mengelola pembangunan yang di usulkan
- d. Camat tidak mengabulkan suatu usulan pembangunan desa dengan alasan masih ada kepentingan atau kebutuhan dari pemerintah yang lebih penting di bandingkan dengan usulan dari desa/kelurahan
- e. Camat menolak atau tidak merealisasikan suatu usulan pembangunan dengan alasan pembangunan yang di ajukan desa/kelurahan bentuknya selalu sama setiap tahun anggaran dan tidak terjadi perubahan terhadap usulan yang diajukan dari tahun sebelumnya.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

1. Bahwa pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan telah di jalankan secara optimal karena masih adanya beberapa hambatan dari pelaksanaan pembangunan

fisik di Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan seperti tidak dipahaminya instruksi mengenai pelaksanaan pembangunan serta tidak sesuai rencana dari kecamatan dengan desa.

2. Mengenai pelaksanaan pembangunan diketahui belum berjalan secara baik karena pembangunan yang di rencanakan kurang efektif seperti hasil yang di buat oleh Camat masih ada yang kurang sesuai dengan keinginan masyarakat sekitar seperti pengerasan jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat namun tidak pernah terealisasi.
3. Diketahui pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Belum berjalan dengan baik dan kurang optimal karena perencanaan yang ada tidak sama dengan yang di rumuskan oleh kecamatan dan desa.
4. Tidak difahaminya instruksi yang diberikan camat seperti instruksi mengenai penanganan anggaran yang selalu di salah mengerti oleh kepala desa yang ada, hal ini terlihat dalam pelaksanaan pembanguna sering kekurangan anggaran jadinya dan tidak sesuai dengan rencana .
5. Tidak adanya rencana yang jelas dari camat terhadap desa dalam pelaksanaan pembanguna ini sehingga sering terjadi dualisme kebijakan dalam pelaksanaanya.
6. Kurangnya anggaran yang di sediakan oleh camat yang berasal dari Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) sehingga membatasi kegiatan desa dalam menjalankan tugasnya.

6.2. Saran

1. Sebaiknya pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan harus lebih optimal, juga perlu ditingkatkan guna pemerataan pembangunan di setiap sektor pada setiap kecamatan hingga kedesa.
2. Pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
3. Dianjurkan kepada camat agar dapat menjalankan tugasnya dan membuat rencana pembangunan bersama kepala desa serta BPD yang disediakan oleh pemerintah kabupaten sehingga perencanaan pembangunan akan optimal sesuai dengan yang di inginkan masyarakat
4. Sebaiknya camat mensosialisasikan terlebih dahulu rencana pembangunan yang akan dilakukan di setiap desa.
5. Dianjurkan kepada kecamatan untuk menjalankan instruksi yang di berikan kepada desa supaya perencanaan pembangunan berjalan dengan baik serta melakukan pembangunan secara merata disemua desa/kelurahan yang ada di daerah ruang lingkup kecamatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Awang, Azam, 2010, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bartakusumah, Ahmad. 2005. *Manajemen Pelayanan Umum*. Jakarta: Institut Ilmu Pemerintahan Press.
- Fielman, Mark. 2002. *Manajemen Strategi (Konsep)*. Jakarta: PT Prenhallindo.
- Hakim, Abdul. 2002. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Ekonesia, KAmplus Fakultas Ekonomi UII.

- Hasibuan, Malayu. 2001. *Manajemen Pelayanan Masyarakat*. Jakarta: LAN-RI Edisi ke-2.
- Irman. 2008. *Psikologi Sosial*. Jakarta:
- Kartasasmita, Ginanjar. 2004. *Manajemen Pembangunan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Koesoemohatmodjo, Agus. 2009. *Perencanaan Dalam Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kuswata, R Agustoha. 2005. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Mahaka Media.
- Notosusanto, Nugroho dan Randi Andika. 2007. *Suatu Tinjauan Mengenai Pembangunan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga
- Rasyid, Muhammad Ryaas. 2001. *Makna Pemerintahan (Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan)*. Jakarta: PT. Yarsif Watampone.
- Sarwoto. 2005. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Siagian. 2004. *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Singarimbun Masri dan Efendi Sofyan. 2005. *Metodologi Penelitian Survey*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soemarwoto. 2003. *Winning Strategy Strategi Effetif Merebut & Mempertahankan Pangsa Pasar*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Sufian. 2005. *Organisasi, Manajemen dan Aplikasi*. Pekanbaru: UIR Press.
- Sugiyono. 2005. *Manajemen Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suharto. 2008. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Suryadi. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Aksara.
- Syamsi, Ibnu. 2006. *Perencanaan yang Efektif*. Jakarta: Hajimasagung.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2007. *Administrasi Pembangunan*. Bandung: Rineka Cipta.

Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Wasistiono, Sadu, M. Irwan Taher, 2007, *Prospek Pengembangan Desa*, Jakarta : Fokus Media

Widjaja, HAW, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Pengertian Otonomi Daerah

Menurut pasal 1 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang pemerintahan daerah mendefenisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan Sumaryadi (2005:48) mengatakan, otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sebagai manifestasi dari desentralisasi. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang dan mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri sesuai dengan perundang-undangan.

Selanjutnya Widjaja (2009:76-77) menjelaskan, otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah dengan otonomi adalah proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan masyarakat.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain; menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan, sejalan dengan penyerahan urusan, apabila urusan tersebut akan menjadi beban daerah, maka akan dilaksanakan melalui asas pembangunan.

Dengan demikian, dampak pemberian otonomi daerah ini tidak terjadi pada organisasi/administrative pemerintah saja, akan tetapi berlaku juga pada masyarakat (publik). Peranan masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah akan semakin besar dan menentukan. Perlu kita sadari tanpa meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta, otonomi akan kehilangan makna dasarnya. Melalui otonomi, pemerintah daerah mempunyai peluang yang lebih besar untuk mendorong dan memberi motivasi membangun daerah yang kondusif, sehingga akan munculnya kreasi dan inovasi masyarakat yang dapat bersaing dengan daerah lain. Disamping itu, daerah dapat membangun pusat pertumbuhan daerah, mengingat daerah lebih akrab dengan masyarakat dan lingkungannya.

Otonomi daerah tidak dipandang semata-mata sebagai hak dan wewenang, akan tetapi lebih merupakan kewajiban dan tanggung jawab, sehingga bagi daerah dituntut mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM), kelembagaan ketatalaksanaan, kualitas personal (birokrat), kelayakan organisasi, dan kecanggihan administrasi.

Menurut Josef (2007:66-70) ada 4 faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah:

1. Manusia pelaksanaannya harus baik.

Manusia merupakan subjek atau pelaku dalam setiap aktivitas pemerintahan sebagai penggerak proses mekanisme dalam pemerintahan harus baik agar tercapainya tujuan yang diharapkan, pengertian baik disini meliputi:

- a. Mentalitasnya/moralnya baik dalam arti jujur, mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaan, dapat bersikap sebagai abdi masyarakat.
- b. Memiliki kecakapan/kemampuan yang tinggi untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

2. Keuangan harus cukup dan baik

Mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang, antara lain berupa sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup, dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku.

3. Peralatannya harus cukup dan baik

Setiap benda atau alat yang dapat digunakan untuk dapat memperlancar pekerjaan atau kegiatan pemerintah daerah. Peralatan yang baik (praktis, efisien, dan efektif).

4. Organisasi dan manajemennya harus baik

Organisasi yang dimaksudkan adalah organisasi dalam arti struktur yaitu susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat, kekuasaan, tugasnya dan hubungannya satu sama lain, dalam rangka mencapai sesuatu tujuan tertentu, sedangkan yang dimaksudkan dengan manajemen adalah proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerjasama, sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai.

Kemudian Durumurti (2002:1-2) mengemukakan otonomi daerah mengandung beberapa segi:

- a. Bahwa otonomi daerah bukan skema kedaulatan daerah dalam konteks Negara federal. Otonomi daerah dalam kerangka undang-undang Dasar 1945 pasal 18 yang menyebutkan pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, sebagai bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara hak asal usul dalam negara yang bersifat Istimewa.
- b. Kebijakan otonomi lebih merupakan perubahan dalam tatanan susunan kekuasaan, termasuk dalam perubahan dalam prinsip kerja pemerintah dimana daerah mendapat kewenangan untuk mengatur urusan daerahnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian otonomi mempunyai daya skema, otonomi dipandang sebagai pendekatan baru dalam menjalankan pembangunan. Pendekatan baru ini tentunya akan menumbuhkan bukti praktis dimana kekuasaan pusat memberikan kepercayaan penuh terhadap daerah untuk mensejahterakan rakyat dengan menjaga integrasi bangsa.
- c. Proses yang dijalankan orde baru tidak memberikan kepada partisipasi masyarakat tidak seksama menunjukkan bagaimana akibat elitisme politik tersebut. Akibat dari sesuatu yang dimaksud tersebut bukan sesuatu yang ditanggungoleh elit politik melainkan oleh masyarakat. Dari ketiga segi tersebut dinyatakan bahwa otonomi daerah pada dasarnya adalah sebuah koreksi terhadap struktur kekuasaan yang semula lebih berakar ke atas menjadi model baru yang berorientasi ke bawah.

Syamsudin Haris (2009:9) menyatakan visi otonomi daerah itu sendiri dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksinya yang utama: Politik, ekonomi, serta sosial budaya.

- a. Bidang politik, otonomi daerah adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan semokrasi, maka ia harus difahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi

lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik. Otonomi daerah juga berarti kesempatan membangun struktur Pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun sistem dan pola karier dan administratif yang kompetitif, serta mengembangkan system manajemen pemerintahan yang efektif.

- b. Bidang ekonomi; otonomi daerah itu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di lain pihak terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam konteks ini, otonomi akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perjanjian usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi daerah.
- c. Bidang sosial dan budaya; otonomi harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan di sekitarnya.

Sumarayadi (2005:64) mengemukakan tujuan pemberian otonomi daerah yang mengemukakan ada tiga hal yang lebih desentralistik yaitu sebagai berikut:

- a. Pembangunan masyarakat sebagai pengadaan pelayanan masyarakat. Pembangunan masyarakat identik dengan peningkatan pelayanan dan pemberian fasilitas sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan sanitasi yang secara keseluruhan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Pembangunan masyarakat sebagai upaya terencana mencapai tujuan sosial yang kompleks dan bervariasi. Pembangunan masyarakat dapat diartikan sebagai tujuan

ssosial yang lebih sulit dan sukar diukur seperti keadilan, pemerataan, peningkatan kebudayaan kedamaian dan sebagainya. Disini pembangunan di tekankan pada makna *community self reliance* dan *family self reliance*.

- c. Pembangunan sosial sebagai upaya terencana untuk meningkatkan kemampuan manusia berbuat. Pembangunan disini merupakan derivasi (penyimpangan) dari paradigma (pedoman) pembangunan yang berpusat pada manusia/rakyat atau *people centered development*.

A. Pelaksanaan

Agar pelaksanaan setiap kegiatan lebih terarah dan dapat memperoleh hasil yang lebih baik, maka seharusnya setiap kegiatan tersebut harus direncanakan terlebih dahulu.

Berkaitan dengan pengertian perencanaan, ada beberapa sarjana yang mengemukakan pendapatnya antara lain Kuswata (2005:102) yang mengatakan bahwa Perencanaan adalah suatu penentuan urutan tindakan biaya serta penggunaan waktu dan tenaga untuk suatu kegiatan yang didasarkan atas data-data dengan memperhatikan skala prioritas yang wajar dan efisien untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai, sehingga komponen-komponen harus dipadukan secara tepat dan serasi, agar terhindar dan timbulnya pemborosan yang meliputi tenaga, bahan, waktu dan biaya.

Selanjutnya Fiedmann (2002:307) mengatakan bahwa perencanaan itu tidak semata-mata merupakan persoalan instrumentasi saran-saran secara efisien, ia adalah suatu proses yang mungkin mengantar masyarakat menemukan masa-masa depannya.

Biasanya perencanaan itu berupa program yang hanya memuat garis-garis besarnya saja, sedangkan penjabaran yang lebih mendetail dituangkan dalam bentuk proyek.

Bertitik tolak dan pengertian perencanaan yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa perencanaan itu adalah kegiatan menyusun suatu program

yang dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan dana, waktu, tenaga dan skala prioritas dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.

Sedangkan maksud dan perencanaan itu menurut Tjokroamidjojo (2007 : 13) adalah perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lebih adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis bagi kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Selanjutnya menurut Koesoemohatmodjo (2009:07) maksud dan perencanaan adalah Untuk mendapatkan suatu landasan kegiatan yang disusun secara menyeluruh berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan maksud perencanaan itu.

Jadi dapat ditarik suatu pengertian bahwa perencanaan berguna untuk mempermudah mencapai tujuan yang ditetapkan dengan sebaik-baiknya. Perencanaan mempunyai arti penting dalam pembangunan. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kuswata (2005:102) bahwa perencanaan mempunyai peranan penting dalam menunjang keberhasilan suatu kegiatan, Kegiatan di sini adalah kegiatan pembangunan.

Kemudian Wilson dalam Sarwoto (2005:72) mengatakan bahwa Perencanaan penting karena di dalamnya digariskan secara bebas dan tepat tujuan, baik yang berjangka panjang, maupun yang berjangka pendek dan digariskan pula apa saja yang harus dilakukan agar tujuan-tujuan tersebut tercapai.

Suatu perencanaan yang baik, akan sangat berperan dalam menunjang pembangunan, karena perencanaan yang baik akan memberikan peranan sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan
2. Sebagai alat pengendalian, pengawasan dan penilaian
3. Sebagai ukuran untuk mengetahui sasaran sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan
4. Untuk memperoleh daya guna dan hasil guna yang optimal

5. Sebagai alat untuk memberikan suatu keyakinan dan pendapat. (Kuswata, 2005 : 98)

Agar tujuan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya, maka tentu saja harus disusun suatu perencanaan yang baik. Suatu perencanaan dikatakan baik apabila dapat menjawab dengan sebaik-baiknya 6 (enam) unsur pertanyaan mendasar, yaitu:

1. Apa (*what*), yakni mengenai materi kegiatan apa yang akan dilaksanakan.
2. Mengapa (*why*), yaitu alasan memilih dan menetapkan kegiatan tersebut dan mengapa di prioritaskan.
3. Bagaimana dan berapa (*how and how much*), yaitu mengenai cara dan teknis pelaksanaan yang dibutuhkan dengan dana yang tersedia.
4. Dimana (*where*), yaitu pemilihan tempat yang strategis untuk pelaksanaan kegiatan (proyeksi).
5. Kapan (*when*) yaitu pemilihan waktu yang tepat.
6. Siapa (*who*), yaitu menentukan orang yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. ini merupakan subjek pelaksanaan. Kadang-kadang diperlukan juga untuk menentukan siapa sebagai objek pelaksanaan kegiatan. Siapa disini merupakan *whom*. (Syamsi, 2006 134-135)

B. Perencanaan Pembangunan

Pada mulanya perencanaan pembangunan hanya dilakukan di bidang ekonomi. Setelah perkembangan zaman, perencanaan tidak hanya dikenal di bidang ekonomi, melainkan juga dikenal adanya perencanaan pembangunan, baik pembangunan ekonomi, politik, Sosial budaya dan lain-lain.

Definisi dari pembangunan Soemarwoto (2003:139) dapat dicermati sebagai berikut :

“Perencanaan pembangunan pada dasarnya untuk melakukan rencana dan menaikkan taraf atau tingkat hidup dan dapat pula dikatakan bahwa pembangunan bertujuan untuk menaikkan mutu kehidupan, karena mutu hidup dapat diartikan sebagai derajat untuk memenuhi kebutuhan dasar”.

Jadi perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat yang lebih baik. Lebih lanjut dikatakan oleh Suryadi (2005:64) bahwa pembangunan adalah suatu proses dimana masyarakat mulai mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama-sama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut.

Menurut Hakim (2002:129) Perencanaan pembangunan adalah upaya-upaya pemerintah mengkoordinasi kebijakan untuk mencapai tujuan perekonomian nasional seperti pengurangan kemiskinan atau percepatan pertumbuhan.

Sedangkan menurut Todaro (2000:652) perencanaan pembangunan adalah upaya-upaya pemerintah mengkoordinasi pembuatan keputusan dalam jangka panjang, serta untuk mempengaruhi, mengarahkan demi terciptanya tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya.

C. Teori Pembangunan

Pembangunan pada intinya dilakukan adalah untuk melakukan perubahan ditengah masyarakat. Membawa masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi-defenisi yang bermacam-macam . Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan.

Menurut Siagian (2004:12) Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernisasi dalam rangka pembinaan (*Nation Building*)”.

Sedangkan Kartasasmita (2004:23) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentifikasikan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan *modernisasi* dan *industrialisasi*, bukan pembangunan dengan *westernisasi*, secara keseluruhan mengandung arti perubahan, namun pemikiran tersebut memiliki perbedaan yang cukup prinsip, karena masing-masing mempunyai latar belakang, asas dan hakikat yang berbeda setiap prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan.

Menurut Bartakusumah (2005 :5) bahwa sebagaimana dikemukakan oleh para ahli, pembangunan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana, sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan.

Menurut Suryadi (2005:64) bahwa pembangunan adalah suatu proses dimana masyarakat mulai mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama-sama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut.

Menurut Hasibuan (2001:68) pembangunan adalah usaha untuk meningkatkan teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan.

Menurut Soedjatmojo dalam Nugroho dan Randi (2007: 11) pembangunan tidak lain adalah belajar untuk hidup lebih baik dari pada hari kemarin, dan pembelajaran adalah bagian dari inti pembangunan pada zaman kini dan mungkin sampai kurun waktu yang panjang dimasa depan.

Negara Indonesia saat ini tengah menerapkan sistem pemerintahan daerah sesuai dengan perundang-undangan No 32 Tahun 2004 yang mengganti penyempurnaan dari UU No 22 Tahun 1999, menurut Suharto (2008:5) menyatakan bahwa setidaknya pembangunan harus memiliki tujuan yang satu sama lain saling terkait:

1. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan kepada seluruh anggota masyarakat.
2. Mencapai kualitas hidup yang bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan secara material, melainkan juga untuk mewujudkan kepercayaan diri dan kemandirian bangsa.
3. Memperluas kesempatan ekonomi dan sosial bagi individu dan bangsa melalui pembebasan dari perbudakan dan ketergantungan pada orang atau bangsa lain serta pembebasan dari kebodohan dan penderitaan.

Pembangunan selain menjadi kewajiban pemerintah pusat juga merupakan kewajiban masing-masing pemerintah di daerah. Dalam rangka efektifitas konsep sistem terbuka perencanaan strategis dalam pembangunan pedesaan.

Dalam hal ini Sufian (2005 : 5) menyatakan sebaiknya meliputi upaya-upaya besar yang satu sama lain saling berkaitan. Upaya-upaya besar tersebut merupakan bagian dari konsep sistem terbuka perencanaan strategis dalam pembangunan pedesaan yang kontekstual, antara lain :

1. Memberdayakan ekonomi masyarakat Desa, melalui upaya : pemberdayaan koperasi dan bahan pertanian, masukan modal, penyediaan teknologi, penataan kembali sistem produksi dan distribusi dan pemasaran produk pedesaan.
2. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintah dan masyarakat pedesaan, melalui pendidikan dan pelatihan serta proses pembelajaran. Upaya ini sekurang-kurangnya harus meliputi aspek pendidikan, kesehatan dan gizi.

3. Memfungsikan semua lembaga-lembaga yang ada termasuk instansi terkait yang bertugas sebagai pelopor (agen) pembangunan pedesaan.
4. Membimbing dan mengarahkan masyarakat pedesaan untuk melakukan berbagai kegiatan yang produktif, serta memberikan contoh dalam kegiatan perkebunan, pertanian, perikanan dan lain-lain dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
5. Membangun sarana-prasarana perdesaan serta memberikan kemudahan bagi para investor nasional dan internasional untuk berinvestasi di pedesaan.
6. Mengarahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan pertanian yang sesuai dengan kondisi dan struktur tanah, potensi alam dan potensi masyarakat serta kondisi permintaan pasar.

Menurut Peraturan Daerah (PERDA NO 13 tahun 2007, pasal 2). Menerangkan bahwa pembangunan adalah upaya / proses perubahan yang lebih baik, baik itu diartikan dalam kepentingan masyarakat di segala bidang baik desa dan kelurahan. Pembangunan desa di selenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuan dan kesatuan desa.

D. Pembangunan Desa

Desa sebagai salah satu entitas pemerintahan paling rendah menjadi arena paling tepat bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan kepentingannya guna menjawab kebutuhan kolektif masyarakat.

Mengacu pada UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 206 disebutkan bahwa kewenangan desa mencakup:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;

- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota, tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah, kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangan diserahkan kepada desa. memiliki keleluasaan untuk mengalokasikan anggaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa (pembangunan) sesuai dengan kebutuhan di desa tersebut. Terlebih lagi saat ini, banyak sekali proyek-proyek pembangunan baik itu dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan dari lembaga donor yang memilih desa sebagai wilayah kerja proyeknya. Proyek-proyek berupa pembangunan fisik sarana prasarana, bantuan sosial hingga bantuan ekonomi sepatutnya menjadi energi pendorong tersendiri bagi desa untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan pembangunan desa. Namun demikian, pengelolaan potensi anggaran ini belum dapat dikoordinasikan dan dikelola dengan cukup baik oleh desa sehingga proyek-proyek tersebut dilaksanakan tidak terencana sebagai bagian dari rencana pembangunan desa yang lebih komprehensif.

Sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa bahwa landasan pemikiran pengaturan (tata kelola) mengenai desa yaitu:

- a. Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah 'desa' dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.
- c. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman.
- d. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa.
- e. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan

kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi luas yang dianut oleh UU No. 32/2004, Pemerintah hanya menjalankan lima kewenangan, dan diluar lima kewenangan itu menjadi kewenangan daerah. Dengan demikian konsepsi dasar yang dianut UU No. 32/2004, otonomi berhenti di kabupaten/kota. Kosekuensinya, pengaturan lebih jauh tentang desa dilakukan oleh kabupaten/kota, dimana kewenangan desa adalah kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa.

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam system pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Menurut ketentuan hukum yang berlaku, pemerintah desa sebagai dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, pembangunan maupun kemasyarakatan prinsipnya terdiri dari seorang kepala desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh aparatur/perangkat desa. Hal ini perlu diperhatikan karna perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala desa.

E. Pembangunan Kecamatan

Penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan menghendaki terlaksananya sebagai kebijaksanaan dan program oleh seluruh badan pemerintahan. Berbagai pelaksanaan program dan pencapaian sasaran pembangunan yang ada merupakan kegiatan yang bersifat antara sector dan antara lembaga.

Dalam hal ini Kecamatan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan penyusunan program dan pembinaan pembangunan, pelayanan umum, perekonomian,

produksi dan distribusi, pemberdayaan perempuan, lingkungan pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut (PP Nomor 25 tentang kecamatan)

1. Penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana fisik
2. Penyusunan program dan pembinaan lingkungan hidup
3. Penyusunan program dan pembinaan perekonomian masyarakat desa/Camat produksi dan distribusi.

2.1.1.Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun secara berkelompok atau masyarakat. Untuk menyatukan mengingat konsep dasar pembangunan tersebut, maka strategi pembangunan nasional yang disusun oleh pemerintah provinsi adalah menyusun secara rinci secara sektor dan strateginya sesuai dengan potensi, kecakapan, dan aspirasi lokal. Ibaratnya, strategi pembangunan nasional adalah menu yang lengkap untuk diberikan kepada masyarakat membangun di daerahnya untuk dapat memilih sesuai dengan prioritas pembangunan di daerahnya masing-masing. Secara sektoral, bidang-bidang pembangunan adalah ekonomi, politik, sosial budaya. Diluar itu, sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004, berdasarkan sektor yang dilakukan oleh pemerintah pusat, yaitu berhubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, hukum dan agama.

2.1.2.Otonomi Desa

Dalam membicarakan masalah otonomi, desa menjadi bagian tak terpisahkan. Otonomi desa yang dikenal sebagai hak yang dikenal untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pernyataan tentang derajat kebebasan didalam pengelolaan sumber daya alam yang bermamfaat dan sumber daya manusia yang ikut serta membangun desa. Kata “ desa” sendiri berasal dari bahasa india yakni “*swadesi*”(dalam Wasistono, 2007:7) yang berarti tempat asal, Tempat tinggal,

negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.

Desa adalah suatu wilayah yang didiami sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umunya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangganya sendiri dan secara administratif berada dibawah pemerintahan kabupaten/kota (Nurcholis, 2011:4). Selanjutnya Soetadjo dalam Nurcholis (2011: 12) menjelaskan bahwa desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Menurut Widjaja (2003: 165), otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Kemudian dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, dijelaskan bahwa otonomi asli memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat 12, disebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat dipahami bahwa desa memiliki keistimewaan tersendiri. Karena jika dibandingkan dengan otonomi daerah propinsi, kabupaten/kota yang otominya diberikan oleh pemerintah atau secara formal melalui sistem desentralisasi sedangkan desa memiliki otonomi yang asli yang jauh lebih dulu telah ada sebelum negara ini ada. Data terakhir jumlah desa di Indonesia menurut Ditjen Administrasi Kependudukan Depdagri tahun 2007 (dalam Nurcholis, 2011:2) adalah 65. 189 desa sedangkan kelurahan berjumlah 7. 878 kelurahan. Ini artinya bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekitar 89 % berupa pemerintahan desa dan hanya sekitar 11 % berupa pemerintahan kelurahan yang bersifat perkotaan.

Berdasarkan data tersebut maka kedudukan desa sangat penting baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia. Sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan sedangkan sebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan lembaga yang dapat memperkuat lembaga pemerintahan nasional karena sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa telah terbukti memiliki daya tahan luar biasa sepanjang keberadaannya. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa telah memiliki struktur kelembagaan yang mapan yang dihormati dan dilestarikan oleh masyarakat desa yang bersangkutan (Nurcholis, 2011:2).

Keperluan otonomi desa, disamping memang sudah ada melekat pada desa bersangkutan, juga merupakan konsekuensi logis dari adanya perbedaan etnik, budaya dan tuntutan yang beraneka ragam dari masing-masing desa. Sehingga dengan adanya otonomi desa diperoleh kesempatan yang luas untuk mengetahui potensi sumber daya, masalah, kendala serta memperbesar akses setiap warga desa untuk berhubungan

langsung dengan pemimpinnya ataupun sebaliknya memenuhi kebutuhan desa secara tepat (Awang, 2006:33).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan terhadap desa di luar desa genekologis yaitu dengan yang bersifat administratif ataupun alasan lain yang warganya pluralistik, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

Selanjutnya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangannya yaitu :

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten /kota yang pengaturannya diserahkan kepada desa;
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Landasan pemikiran mengenai pengaturan desa disebutkan dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 yaitu :

- a. Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara.

- b. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.
- c. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman.
- d. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.
- e. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Desa merupakan subyek hukum, Talizuduhu Ndraha dalam Nurcholis (2011:21) menjelaskan bahwa desa yang otonom adalah desa yang merupakan subyek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan antara lain :

- a. Mengambil keputusan atau membuat peraturan yang dapat mengikat segenap warga desa atau pihak tertentu sepanjang menyangkut rumah tangganya;

- b. Menjalankan pemerintahan desa;
- c. Memilih kepala desa;
- d. Memiliki harta benda dari kekayaan sendiri;
- e. Memiliki tanah sendiri;
- f. Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri;
- g. Menyusun APPKD (Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Desa);
- h. Menyelenggarakan gotong royong;
- i. Menyelenggarakan peradilan desa;
- j. Menyelenggarakan usaha lain demi kesejahteraan desa.

Menurut Awang (2010:53) penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan kewenangan desa itu sendiri, baik untuk menetapkan suatu kebijakan maupun untuk melaksanakan kebijakan itu sendiri yang didasarkan pada kebutuhan, kepentingan dan aspirasi masyarakat lokal setempat. Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabnya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyatakan

dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggung jawaban yang dimaksud.

2.1.3. Pembangunan Desa

Pembangunan desa pada masa orde baru dilandasi Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1979, banyak referensi mengatakan bahwa pembangunan masa ini justru menghancurkan sendi-sendi kekuatan desa itu sendiri sebagai daerah yang otonom. Sebagai agen terdepan dan menyentuh serta berinteraksi langsung dengan masyarakat, desa harus benar-benar diperhatikan dengan melakukan pembangunan dan penguatan desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang mana desa selalu diidentikan dengan keterbelakangan.

Dalam Syafrudin (2010:32) dijelaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ini mendapatkan kritikan karena penyeragaman (Uniformitas), nama, bentuk, susunan dan kedudukan pemerintahan desa. Padahal, dalam merumuskan arah kebijakan (*legal policy*), pemerintahan desa perlu pengakuan dan penghormatan terhadap asal-usul yang bersifat istimewa pada eksistensi desa, yakni dengan memperbolehkan penggunaan nama seperti dusun, marga, nagari, meunasah, gampong, negorij dan lain sebagainya, yang bentuk, susunan maupun mekanisme pemerintahan didasarkan pada adat istiadatnya masing-masing. Sangat banyak keinginan yang menghendaki agar institusi yang disebut desa jangan diseragamkan karena keadaan desa-desa di Indonesia berbeda-beda, tidak bisa disamakan desa-desa di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya dan seterusnya.

Setelah reformasi bergulir UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang desa ini akhirnya digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengintegrasikan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dalam satu produk hukum. Undang-Undang ini lebih memberikan kesempatan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat

istiadatunya. Kurang lebih 5 tahun setelahnya lahir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Subtansi Undang-Undang ini hampir sama dengan Undang-Undang sebelumnya. Keduanya telah menginternalisasi pemerintahan desa yang integral dari pemerintahan daerah dalam satu Undang-Undang. Menurut Syafrudin (2010:33) satu hal yang menarik tidak pernah dilakukan dan ada dalam sejarah hukum pemerintahan desa di Indonesia baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan adalah untuk pertama kalinya jabatan sekertaris desa diharuskan (diangkat) dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurut Ali Hanapih Muhi (2011:4) Pembangunan desa pada hakikatnya adalah segala bentuk aktivitas manusia (masyarakat dan pemerintah) di desa dalam membangun diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan di wilayah desa baik yang bersifat fisik, ekonomi, sosial, budaya, politik, ketertiban, pertahanan dan keamanan, agama dan pemerintahan yang dilakukan secara terencana dan membawa dampak positif terhadap kemajuan desa. Dengan demikian, pembangunan desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumberdaya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi-organisasi/lembaga domestik maupun internasional untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik.

Berbicara tentang pembangunan desa terdapat dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan. Menurut Ali Hanapih Muhi (2011:4) secara umum, pembangunan desa meliputi dua aspek utama yaitu pembangunan desa dalam aspek fisik dan pembangunan dalam aspek pemberdayaan insani. Pembangunan desa dalam aspek fisik yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) di pedesaan seperti jalan desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan (*hardware* berupa sarana dan prasarana

pendidikan, dan *software* berupa segala bentuk pengaturan, kurikulum dan metode pembelajaran), keolahragaan, dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut pembangunan desa.

Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insani yaitu pembangunan yang objek utamanya aspek pengembangan dan peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat di daerah pedesaan sebagai warga negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual, dan sebagainya. Tujuan utamanya adalah untuk membantu masyarakat yang masih tergolong marjinal agar dapat melepaskan diri dari berbagai belenggu keterbelakangan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insani ini selanjutnya disebut sebagai pemberdayaan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat menurut Widjaja (2005:169) adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Fungsi Pemerintah baik pusat, daerah maupun desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut terdiri dari pelayanan publik, pelayanan pembangunan dan pelayanan perlindungan. Pemberian pelayanan tersebut ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat (Nurcholis, 2011:103). Dalam konteks desa pencapaian tujuan pembangunan yang efektif bagi desa harus disertai dengan partisipasi masyarakatnya. Pemerintahan desa adalah pemerintahan yang memiliki hubungan lebih dekat dan harmonis dengan masyarakatnya. Mengingat masyarakat desa memiliki hubungan kekerabatan dan/atau hubungan sosial, ekonomi dan keamanan yang menciptakan ikatan lahir batin di antara masyarakatnya.

Selanjutnya Nurcholis (2011:104) menyatakan pelayanan pembangunan adalah pelayanan pemerintah desa dalam bentuk melakukan pembangunan yang berdampak pada peningkatan pendapatan warga desa baik langsung maupun tidak langsung. Menurut Widjaja (2005:95) setiap desa memiliki kondisi dan potensi yang khas berbeda dengan desa lainnya, demikian pula aspirasi dan karakter masyarakatnya oleh sebab itu pembangunan di desa memang sepatutnya lebih banyak ditentukan oleh masyarakat desa sendiri. Kedudukan pemerintah desa yang telah diberikan kewenangan penuh untuk memberdayakan masyarakatnya sudah tentu harus mempunyai kemampuan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih mengedepankan hak-hak masyarakat. Dengan demikian, kedudukan kepala desa lebih merupakan wakil dari pemerintah desa dan masyarakat desa itu sendiri daripada sebagai wakil pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Oleh karena itu menurut Ali Hanapiyah Muhi (2011:8) pembangunan desa dalam aspek pembangunan fisik, pembangunan prasarana dan sarana di daerah pedesaan semestinya menempatkan penduduk atau masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan menunjukkan bahwa masyarakat daerah pedesaan berperan sebagai pelaku pembangunan. Sudah semestinya masyarakat sebagai pelaku pembangunan mengambil posisi untuk berperan secara aktif dalam proses pembangunan. Peran aktif masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk keterlibatan atau pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan, apakah pada tahap pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan atau pada semua tahap proses pembangunan tersebut.

Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu hal yang penting bagi keberhasilan suatu kegiatan pembangunan yang menuju kepada kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat yang lebih baik. Wang (dalam Awang, 2006:61)

mendefenisikan partisipasi sebagai proses kegiatan yang dilakukan oleh seorang ataupun oleh kelompok sebagai pernyataan kepentingan mereka untuk menyumbangkan tenaga dan sumber daya lainnya kepada institusi sosial dan sistem yang mengatur kehidupan mereka.

Lebih jauh Wang mendefenisikan partisipasi terbagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut :

1. *Voluntary participation*; partisipasi secara sukarela dan parsipasi yang berasal dari masyarakat sendiri. Derajat partisipasi berkaitan dengan tingkat pendidikan warga masyarakat. artinya semakin tinggi tingkat pendidikan, maka partisipasi secara sukarela akan semakin tinggi pula.
2. *Induced participation*; partisipasi setengah-setengah yaitu sebagian berasal dari pemerintah dan sebagian lagi dari swadaya masyarakat.
3. *Forced participation*; partisipasi yang dipaksakan atau disebut juga dengan mobilisasi.

Kemudian Awang (2006:62) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa adalah keikutsertaan masyarakat dalam segala kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemamfaatan sampai pemeliharaan dan pengawasan yang diselenggarakan di desa dengan cara memberikan sumbangan baik berbentuk materil seperti uang, barang dan tenaga, maupun dalam bentuk spiritual seperti pemikiran dan gagasan.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia. Sebagaimana

disebutkan dalam pasal 5 Permendagri No 66 tahun 2007, karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedangkan partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

2.1.4. Peranan Kepala Desa

2.1.4.1 Pengertian Peranan

Peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1051) yaitu :bagian yang dimainkan seorang pemain (di film, sandiwara, dsb); tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Beberapa pengertian tentang peranan, pertama menurut Thoha (2006:10) peranan dirumuskan sebagai perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Menurut Soekanto (2005:212) peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Kemudian ia menyatakan pengertian peranan mencakup tiga hal yaitu :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dapat dipahami peranan ada karena adanya sebuah kedudukan ataupun posisi seseorang. Kedudukan yang dimaksud bisa dalam berbagai organisasi maupun struktur sosial. Kepala desa adalah seorang pemimpin. Dengan kedudukannya sebagai pemimpin ia diharapkan bisa menjalankan peran kepemimpinannya. Menurut Rivai (2006:148) Peran kepemimpinan dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin. Jadi dapat dinyatakan bahwa peranan kepala desa adalah perilaku yang teratur dan timbul karena kedudukan atau posisinya dalam memimpin desa

2.1.4.2 Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Kepala desa adalah unsur penyelenggara pemerintah desa yang berkedudukan sebagai pemimpin pemerintah desa. Sebagai pemimpin pilihan masyarakat, kepala desa tentunya memiliki kemampuan atau dianggap mampu oleh masyarakat dalam kepemimpinannya menjalankan roda pemerintahan di desa sebagaimana disebutkan dalam pasal 203 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang selanjutnya pelaksanaannya diatur dalam peraturan daerah.

Menurut George R. Terry dalam Kartono (2006:57) kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka suka berusaha mencapai tujuan kelompok. Orway Tead menyatakan kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya Howard H. Hoyt mendefinisikan kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi tingkah laku manusia, kemampuan untuk membimbing orang.

Kemudian Kartono (2006:57) menyimpulkan bahwa kepemimpinan itu terdapat unsur-unsur yaitu :

- a. Kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau orang lain;
- b. Kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau orang lain;

- c. Untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok.

Menurut Thoha (2006:121) kepemimpinan adalah aktifitas untuk memengaruhi perilaku orang lain agar mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Orang yang menjalankan kepemimpinan selanjutnya disebut pemimpin. Pemimpin memiliki peranan penting dalam suksesnya pencapaian tujuan suatu kelompok/ organisasi. Oleh karenanya Kartini Kartono dalam Pasolong (2011:114) kepemimpinan itu harus selalu dikaitkan dengan tiga hal penting yaitu :

- a. Kekuasaan yaitu otoritas dan legalitas yang memberikan kewenangan kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu;
- b. Kelebihan, keunggulan, keutamaan sehingga orang mampu mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh pada pemimpin dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu;
- c. Kemampuan, yaitu segala daya, kesanggupan, kekuatan dan kecakapan/keterampilan teknis maupun sosial yang dianggap melebihi dari kemampuan anggota biasa.

Menurut Widjaja (2005:31) kepemimpinan secara umum merupakan kemampuan seseorang (pemimpin) untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain tersebut bertindak laku sebagaimana yang dikehendaki pemimpin tersebut. Kepemimpinan kepala desa pada dasarnya bagaimana kepala desa dapat mengkoordinasi seluruh kepentingan masyarakat desa dalam setiap pengambilan keputusan. Kepala desa akan berhasil apabila dalam kepemimpinannya memerhatikan suara masyarakat yang dipimpin secara demokratis yaitu mencerminkan keterbukaan, bertanggung jawab dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada hasil kesepakatan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya kepala desa mempunyai peranan yang sangat penting terhadap berhasil atau tidaknya pembangunan suatu desa. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang diatur kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 04 tahun 2010 kepala desa mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, yaitu pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa;
- b. Menyelenggarakan urusan pembangunan, yaitu pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa;
- c. Urusan administrasi umum dan keuangan, yaitu melaksanakan pengendalian surat-surat masuk dan keluar serta pencatatan administrasi keuangan desa;
- d. Menyelenggarakan urusan kesejahteraan masyarakat, yaitu pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, kepala desa mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud, kepala desa mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Kepala desa dilarang melakukan tindakan yang telah dilarang peraturan perundang-undangan yaitu :

- a. Menjadi pengurus partai politik;

- b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menyalahgunakan wewenang; dan
- h. Melanggar sumpah/janji jabatan.

Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat, yang diterapkan dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Kepala desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat. Kepada BPD, kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.

Dapat dipahami akan beratnya tugas dan pentingnya kedudukan kepala desa dalam sebuah desa. Kemampuan kepemimpinan kepala desa cukup menentukan akan keberhasilan desa dalam pembangunan di berbagai aspek kehidupan. Oleh karenanya kepala desa harus mempunyai sifat yang mencerminkan jiwa kepemimpinan yang baik.

Menurut Kartono (2006:328) sifat-sifat kepemimpinan yang unggul adalah berani, tegas, kaya akan inisiatif, peka terhadap lingkungan dan bawahan, mampu menjalin komunikasi yang akrab, berani mengambil keputusan dan resiko, bertanggung jawab dan konsekuen, bersikap terbuka, jujur dan mempunyai prinsip-prinsip yang teguh.

Kepemimpinan memiliki fungsi-fungsi dalam usaha untuk pencapaian tujuan. Menurut Rivai (2006:53) fungsi artinya jabatan (Pekerjaan) yang dilakukan atau kegunaan sesuatu hal atau kerja suatu bagian tubuh. Sedangkan fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial. Selanjutnya fungsi kepemimpinan diselenggarakan dalam aktifitas kepemimpinan secara integral pelaksanaannya berlangsung sebagai berikut :

- a. Pemimpin berkewajiban menjabarkan program;
- b. Pemimpin harus mampu memberikan petunjuk yang jelas;
- c. Pemimpin harus berusaha mengembangkan kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat;
- d. Pemimpin harus mengembangkan kerjasama yang harmonis;
- e. Pemimpin harus mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan masalah sesuai batas tanggung jawab masing-masing;
- f. Pemimpin harus berusaha menumbuhkan kembangkan kemampuan memikul tanggung jawab;
- g. Pemimpin harus mendayagunakan pengawasan sebagai alat pengendali.

Koordinasi merupakan konsep dasar kedua disamping kepemimpinan, sebab koordinasi dan kepemimpinan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena saling

mempengaruhi. Koordinasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka proses pencapaian tujuan organisasi. Handoko (dalam Awang, 2010:185) mengemukakan bahwa koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Demikian juga yang diungkapkan Stower (dalam Awang, 2010:185) bahwa koordinasi adalah proses penyatupaduan sasaran dan kegiatan dari unit-unit yang terpisah dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

2.2. Hipotesa

Berdasarkan uraian yang telah dibuat di atas maka dapat ditarik hipotesa penelitian ini yaitu ;

” Diduga Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan belum berjalan dengan efektif ”

2.3. Variabel Penelitian yang terdiri dari :

Pelaksanaan Pembangunan Fisik

2.4. Konsep operasional terdiri dari:

1. Pelaksanaan Pembangunan Fisik;
 - a. Sebagai pedoman pelaksanaan.
 - b. Sebagai alat pengendalian.
 - c. Sebagai alat pengawasan.
 - d. Sebagai alat penilaian.
 - e. Sebagai ukuran untuk mengetahui sasaran.
 - f. Sebagai ukuran untuk mengetahui tujuan yang telah ditentukan.
 - g. Untuk memperoleh daya guna.
 - h. Untuk memperoleh hasil guna yang optimal.
 - i. Sebagai alat untuk memberikan suatu keyakinan.

- j. Sebagai alat untuk memberikan suatu pendapat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Alasan penulis melakukan penelitian disebabkan karena efisiensi kerja aparat pemerintahannya relatif kurang efisien dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dengan di dasarkan pada pengetahuan akan situasi dan kondisi, sehingga akan memudahkan penulis untuk memahami dan menganalisis fenomena-fenomena yang ada.

3.2. Waktu Penelitian

penelitian yang dilakukan penulis pada Mei 2013 hingga selesainya penelitian ini.

3.3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, misalnya dari individu atau perseorangan (Umar, 2002:84). Adapun data tersebut dalam penelitian ini berupa tanggapan responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun teknik dokumentasi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang dapat menunjang aspek yang diteliti di desa. Mengenai data yang diperoleh dari dan yang tersedia di desa yaitu data aparat pemerintahan desa, struktur organisasi dan profil Desa Kuala Terusan.

3.4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010 : 90). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh masyarakat desa berdasarkan KK (Kartu Keluarga) di Desa Kuala Terusan. Data tahun 2013 menunjukkan jumlah KK di Desa Kuala Terusan adalah 213 KK.

b. Sampel

Menurut Sugiyono (2010:91) Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki populasi. Adapun tehnik sampel data penelitian ini menggunakan sampel acak (*random sampling*). Untuk menentukan berapa sampel yang dibutuhkan, penulis menggunakan rumus Slovin dalam penghitungan sampel (dalam Umar, 2002:141) dengan kelonggaran ketidaktelitian sebesar 10%. Adapun penghitungannya adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{663}{1 + 663(10\%)^2}$$

$$n = \frac{663}{1 + 663(0.01)}$$

$$n = \frac{663}{7.63}$$

$$n = 86,89$$

$$n = 87$$

Keterangan : n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = error 10% (Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel).

Jadi, dari hitungan jumlah populasi dari masyarakat berdasarkan KK adalah 213 KK, dengan kelonggaran ketidaktelitian 10%, maka hasil penghitungan dengan menggunakan rumus Slovin tersebut didapat sampel sebanyak 68,05. Menurut Usman (2006:11) jika pecahan yang akan dibulatkan itu lebih dari 0,05 maka pecahan tersebut dibulatkan menjadi 1. Dengan demikian maka jumlah sampel yang penulis ambil dari populasi masyarakat berdasarkan jumlah KK adalah 68,05 yang dibulatkan menjadi 68 orang.

Adapun jumlah populasi dan sampel pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.1
Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian

No.	Tehnik Pengumpulan Data	Subjek Penelitian	Populasi	Sampel
1.	Kuisoner/ Angket	Masyarakat berdasarkan jumlah KK	213	68
2.	Wawancara (key Informan)	a. Kepala desa b. Sekertaris Desa c. Ketua BPD d. Tokoh masyarakat	1 1 1 2	

Sumber : Data Olahan 2013

3.4 Teknik pengumpulan Data

a. Angket (kuesioner)

Angket (kuesioner) adalah suatu cara pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan mereka akan memberikan respons terhadap pertanyaan tersebut (Umar, 2002:92). Adapun responden yang dimaksud adalah seluruh sampel masyarakat Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan berdasarkan pada jumlah KK.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan (Norbuko, 2010:83). Adapun yang diwawancarai adalah kepala desa, Sekdes, ketua BPD dan 2 orang tokoh masyarakat yang diambil dari masing-masing dusun di Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sebagai key Informen pada penelitian ini.

1.5 Analisa Data

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan secara utuh dan nyata keadaan objek yang diteliti kemudian dituangkan kedalam tabel-tabel dengan angka dan persentase dan selanjutnya dianalisa.

b. Rumus Statistik

Dalam menganalisis penulis akan menuangkannya dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan persentase dengan rumusan sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Total Jumlah

c. Skala Pengukuran

Menurut Sugiyono (2010:105) skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Adapun pada penelitian ini penulis menggunakan interval yang didistribusikan kedalam bentuk persen (dalam Usman, 2009:146) dengan alternatif sangat baik sampai dengan tidak baik.

Klasifikasi	Skor	% Interval
Sangat Baik	5	81%-100%
Baik	4	61%-80%
Ragu-Ragu	3	41%-60%
Kurang Baik	2	21%-40%
Tidak Baik	1	0%-20%

$$\begin{aligned}\text{Interval} &= \frac{\text{Nilai \% Max} - \text{Nilai \% Min}}{\text{Jumlah Kelas}} \\ &= \frac{100 \% - 0 \%}{5} \\ &= 20\end{aligned}$$

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1.1. Letak Geografis Kecamatan pangkalan Kerinci

Kecamatan Pangkalan Kerinci terletak di hilir sungai Kampar yang berada di Kabupaten Pelalawan. Kecamatan ini terletak antara 1°25" LU dan 0°,20" LS serta antara 100°,42" ~ 103°,28" BT dengan batas-batas wilayah:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Kuras
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Langgam
- c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Bandar Sekijang
- d. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Pelalawan

Luas wilayah Kecamatan Pangkalan Kerinci pada saat ini adalah 65 KM yang terdiri dari kelurahan dan desa. Adapun kelurahan dan desa itu antara lain:

- 1. Kelurahan Kerinci Kota
- 2. Kelurahan Kerinci Barat
- 3. Kelurahan Kerinci Timur
- 4. Desa Kuala Terusan
- 5. Desa Mekar Jaya
- 6. Desa Rantau baru
- 7. Desa Makmur

1.2. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Pangkalan kerinci

Secara terperinci struktur organisasi Kecamatan Pangkalan Kerinci dapat dilihat pada gambar berikut ini :

1. Susunan Organisasi Kecamatan

A. Camat mempunyai tugas:

1. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan pemerintahan camat.
2. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.
3. Pembinaan pembangunan masyarakat meliputi pembinaan sarana dan prasarana perekonomian, proksi dan pembinaan pembangunan pada umumnya serta pembinaan lingkungan hidup.
4. Pembinaan kesejahteraan sosial.
5. Penyusunan rencana dan program, pembinaan administrasi, ketatatusahaan dan rumah tangga.

B. Sekretaris kecamatan mempunyai tugas:

1. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya.
2. Merumuskan dan melaksanakan urusan administrasi keuangan.
3. Merumuskan dan melaksanakan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

C. Seksi pemerintahan mempunyai tugas:

1. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program penyelenggaraan pemerintahan umum dan kepala desa.
2. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

3. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa.

D. Seksi pembangunan masyarakat mempunyai tugas :

1. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dan pembinaan perekonomian camat dan distribusi.
2. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dan pembinaan lingkungan hidup.
3. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa.

E. Seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas :

1. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program, pembinaan pelayanan dan bantuan social, pembinaan kepemudaan, peran wanita dan olahraga.
2. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan dan melaksanakan penyusunan program, pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat.

F. Seksi pelayanan umum mempunyai tugas :

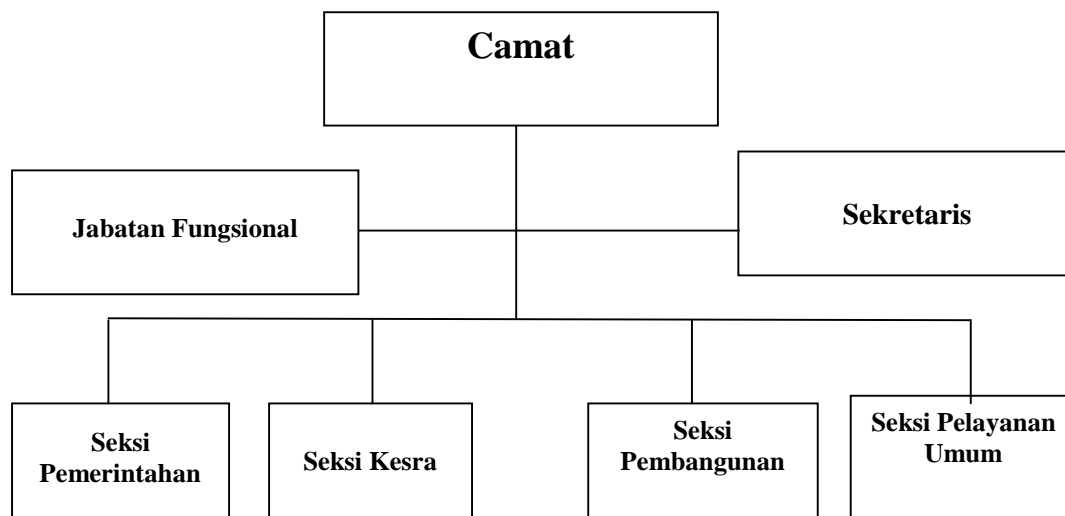
1. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi kepala desa.
2. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi.
3. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum.

Dalam menyelenggarakan tugas-tugas dan fungsinya, kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD (Badan Perwakilan Desa) yang merupakan pemerintahan desa, terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi adat istiadat,

membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan desa.

Bagan struktur organisasi Kecamatan Pangkalan Kerinci diperagakan melalui gambar IV.1:

Gambar IV.I. Bagan Stuktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan



Sumber : Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, 2011

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

5.1 Identitas Responden

5.1.1 Jenis Kelamin Responden

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai identitas responden berikut ini penulis akan menguraikan mengenai identitas responden menurut jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.1
Jenis Kelamin Responden

No	Jenis kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Laki-Laki	44	64,70
2.	Perempuan	24	35,30
Jumlah		68	100 %

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah sampel untuk responden sebanyak 68 orang, yang keseluruhannya terdiri dari 44 responden laki-laki atau 64.70%, sedangkan responden perempuan sebanyak 24 responden atau 35.30%. Jadi jumlah keseluruhan jumlah responden yang dijadikan sampel dari masyarakat Desa Kuala terusan adalah 68 orang.

Dari uraian diatas, terlihat bahwa sebagian besar responden adalah berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 44 orang atau 64,70%, dan kebanyakan responden yang diambil untuk sampel penelitian ini adalah dari kepala keluarga. Alasan penulis lebih banyak mengambil sampel laki-laki karena laki-laki lebih banyak bergerak serta turut aktif dalam kegiatan-kegiatan seperti gotong royong dan musyawarah desa.

5.1.2 Umur Responden

Untuk mengetahui tingkat umur responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.2
Tingkat Umur Responden

No	Tingkat Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1.	17 - 25 Tahun	21	30,89
2.	26 - 34 Tahun	23	33,82
3.	35 - 43 Tahun	16	23,53
4.	44 Tahun keatas	8	11,76
Jumlah		68	100 %

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2013

Dari data diatas dapat dilihat bahwa tingkat umur responden terbanyak adalah pada tingkat umur 26-34 tahun yaitu sebanyak 23 responden atau 30,89%. Tingkat umur 17-25 sebanyak 21 responden atau 30,89%, kemudian tingkat umur 35-43 sebanyak 16 responden atau 23,53%, dan tingkat umur 44 tahun keatas berjumlah 8 responden atau 11,76%.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa tingkat umur responden sudah cukup dewasa dalam memberikan tanggapan-tanggapanya terhadap pertanyaan dalam kuisisioner penelitian ini, sebab menurut penulis kedewasaan umur dapat memberikan isyarat terhadap kemampuan dari seseorang dalam menilai dan memutuskan suatu permasalahan dengan jalan pikir yang lebih matang dan lebih bijak, karena umur berhubungan dengan seberapa banyak pengalaman yang mereka peroleh.

5.1.3 Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan sangat diperlukan dalam pembangunan, karena dengan pendidikanlah sumber daya manusianya akan berkualitas. Untuk mengetahui gambaran dan tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.3
Tingkat Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tamat SD	7	10,29
2	Tamat SLTP / Sederajat	18	26,48
3	Tamat SLTA / Sederajat	27	39,70
4	Sarjana (S1)	16	23,53

Jumlah	68	100 %
---------------	-----------	--------------

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2013

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan responden yang terpilih dalam penelitian ini adalah 68 responden dengan berbagai tingkatan pendidikan yaitu, yang mempunyai latar belakang tamat SD sebanyak 7 orang responden atau 10,29%, tamatan SLTP sebanyak 18 responden atau 26,48%, tamatan SLTA 27 responden atau 39,70%, dan yang mempunyai latar belakang lulusan Perguruan Tinggi atau sarjana sebanyak 16 responden atau 23,53%.

Dari penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa secara umum tingkat pendidikan responden sudah dapat dikatakan baik karena mayoritas responden paling tidak sudah mengenyam pendidikan di SD yaitu responden yang termasuk dalam kategori umur 44 tahun keatas. Namun demikian, variasi tingkat pendidikan responden sudah cukup baik karena mencakup seluruh tingkat pendidikan yakni mulai dari tingkat SD, SLTP, SLTA dan ada juga yang Perguruan Tinggi.

5.2 . Pelaksanaan Pembangunan

Penyelenggaraan pemerintahan selain bertujuan melaksanakan program pembangunan dan pelayanan pada masyarakat disatu sisi ,menjadi tanggung jawab pemerintah namun pada sisi lain sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah membina masyarakat dan pemerintah saling begandengtangan dalam memikul tanggungjawab dalam mensejahterakan masyarakat.

Masalah sumber daya manusia mendapat perhatian secarta khusus, terutama yang berkaitan dengan kualitas, sikap dan tingkah laku, dengan kualitas dan kinerja yang tinggi maka berbagi potensi yang ada dalam masyarakat dapat di dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kepentingan masyarakat.

Table V.4. Tanggapan Responden Tentang Peran Perencanaan Sebagai Pedoman Pelaksanaan Pembangunan

No	Kategori jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat baik	22	32,35
2	Baik	11	16,17
3	Ragu-ragu	16	23,52
4	Kurang Baik	10	14,70
5	Tidak baik	9	13,23
	Jumlah	68	100%

Sumber : data olahan lapangan 2013

Dari data tabel di atas maka diketahui peran perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dapat dikatakan “sangat baik” karena dari 68 responden maka yang menyatakan “sangat baik” ada sebanyak 22 orang atau (32,35%) yang disebabkan dalam melaksanakan setiap pembangunan di kecamatan atau di desa telah mempunyai pedoman yang jelas untuk kegiatannya, selain itu yang menyatakan “baik” ada sebanyak 11 orang atau (16,17%) yang disebabkan kegiatan pembangunan telah baik dalam perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dan yang menyatakan “ragu-ragu” ada sebanyak 16 orang atau (23,52%) dan yang menyatakan “kurang baik” ada sebanyak 10 responden atau (14,70%) dan “tidak baik” ada sebanyak 9 responden atau (13,23%).

Table V.5. Tanggapan Responden Tentang Peran Perencanaan Sebagai Alat Pengendalian Dalam Pelaksanaan Pembangunan

No	Kategori jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat baik	17	25
2	Baik	15	22,05
3	Ragu-ragu	22	32,35
4	Kurang Baik	7	10,29
5	Tidak baik	7	10,29
	Jumlah	68	100%

Sumber : data olahan lapangan 2011

Dari data tabel diatas maka diketahui peran perencanaan sebagai alat pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan dapat dikatakan “ragu-ragu” karena dari 68 responden

maka yang menyatakan “sangat baik” ada sebanyak 17 orang atau (25%) yang disebabkan dalam melaksanakan setiap pembangunan di kecamatan atau di desa telah sesuai dengan peran perencanaan sebagai alat pengendali dalam pelaksanaan pembangunan, selain itu yang menyatakan “baik” ada sebanyak 15 orang atau (22,05%) yang disebabkan kegiatan camat telah baik dalam perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dan yang menyatakan “ragu-ragu” ada sebanyak 22 orang atau (32,35%) dan yang menyatakan “kurang baik” ada sebanyak 7 responden atau (10,29 %) dan yang menyatakan “tidak baik” ada sebanyak 7 responden atau (10,29 %).

Table V.6. Tanggapan Responden Tentang Peran Perencanaan Sebagai Alat Pengawasan Dalam Pelaksanaan Pembangunan

No	Kategori jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat baik	16	23,52
2	Baik	10	14,70
3	Ragu-ragu	22	32,35
4	Kurang Baik	11	16,17
5	Tidak baik	9	13,23
	Jumlah	68	100%

Sumber : data olahan lapangan 2013

Dari data tabel diatas maka diketahui peran perencanaan sebagai alat pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan dapat dikatakan “ragu-ragu” karena dari 68 responden maka yang menyatakan “sangat baik” ada sebanyak 16 orang atau (23,52%) yang disebabkan dalam melaksanakan setiap pembangunan di kecamatan atau di desa pengawasanya kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya, selain itu yang menyatakan “baik” ada sebanyak 10 orang atau (14,70%) dan yang menyatakan ragu-ragu ada sebanyak 22 orang atau (32,35%) dan yang menyatakan kurang baik ada sebanyak 11 responden atau (16,17%) dan yang menyatakan tidak baik ada sebanyak 9 responden atau (13,23%).

Table V.7. Tanggapan Responden Tentang Peran Perencanaan sebagai Alat Penilaian dalam Pelaksanaan Pembangunan

No	Kategori jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat baik	17	25
2	Baik	19	27,94
3	Ragu-ragu	10	14,70
4	Kurang Baik	14	20,58
5	Tidak baik	8	11,76
	Jumlah	68	100%

Sumber : data olahan lapangan 2013

Dari data tabel di atas maka diketahui peran perencanaan sebagai alat penilaian dalam pelaksanaan pembangunan dapat dikatakan “baik” karena dari 68 responden maka yang menyatakan “sangat baik” ada sebanyak 17 orang atau (25%) yang disebabkan dalam melaksanakan setiap pembangunan di kecamatan atau di desa telah sesuai dengan perencanaan pembangunan, selain itu yang menyatakan “baik” ada sebanyak 19 orang atau (27,94%) yang disebabkan kegiatan badan perencanaan pembangunan daerah telah baik dalam perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dan yang menyatakan “ragu-ragu” ada sebanyak 10 orang atau (14,70%) dan yang menyatakan “kurang baik” ada sebanyak 14 responden atau (20,58 %) dan yang menyatakan “tidak baik” ada sebanyak 8 responden atau (11,76%).

Table V.8. Tanggapan Responden Tentang Peran Perencanaan sebagai Ukuran Untuk Mengetahui Sasaran dalam Pelaksanaan Pembangunan

No	Kategori jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat baik	11	16,17
2	Baik	15	22,05
3	Ragu-ragu	16	27,94
4	Kurang Baik	11	16,17
5	Tidak baik	12	17,64
	Jumlah	68	100%

Sumber : data olahan lapangan 2013

Dari data tabel di atas maka diketahui peran perencanaan sebagai ukuran untuk mengetahui sasaran dalam pelaksanaan pembangunan dapat dikatakan “ragu-ragu” karena dari 68 responden maka yang menyatakan sangat baik ada sebanyak 11 orang atau (16,17 %) yang disebabkan camat dalam melaksanakan setiap pembangunan di kecamatan atau di desa telah sesuai dengan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan, selain itu yang menyatakan “baik” ada sebanyak 15 orang atau (21,05%) dan yang menyatakan “ragu-ragu” ada sebanyak 19 orang atau (27,94%) dan yang menyatakan “kurang baik” ada sebanyak 11 responden atau (16,17 %) dan yang menyatakan “tidak baik” ada sebanyak 12 responden atau (17,64%).

Table V.9. Tanggapan Responden Tentang Peran Perencanaan Sebagai Ukuran Untuk Mengetahui Tujuan Yang Telah Ditentukan

No	Kategori jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat baik	16	23,52
2	Baik	10	14,70
3	Ragu-ragu	22	32,35

4	Kurang Baik	11	16,17
5	Tidak baik	9	13,23
	Jumlah	68	100%

Sumber : data olahan lapangan 2013

Dari data tabel di atas maka diketahui peran perencanaan sebagai ukuran untuk mengetahui tujuan yang telah ditentukan dapat dikatakan “ragu-ragu” karena dari 68 responden maka yang menyatakan “sangat baik” ada sebanyak 16 orang atau (23,52%) yang disebabkan dalam melaksanakan setiap pembangunan di kecamatan atau di desa kurang efektif dalam menentukan ukuran dalam dan tujuan pembangunan, selain itu yang menyatakan “baik” ada sebanyak 10 orang atau (14,70%) dan yang menyatakan “ragu-ragu” ada sebanyak 22 orang atau (32,35%) dan yang menyatakan “kurang baik” ada sebanyak 11 responden atau (16,17%) dan yang menyatakan “tidak baik” ada sebanyak 9 responden atau (13,23%).

Table V.10. Tanggapan Responden Tentang Peran Perencanaan untuk Memperoleh Daya Guna yang Dibutuhkan untuk Keperluan Pembangunan

No	Kategori jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat baik	22	32,35
2	Baik	11	16,17
3	Ragu-ragu	16	23,52
4	Kurang Baik	10	14,70
5	Tidak baik	9	13,23
	Jumlah	68	100%

Sumber : data olahan lapangan 2011

Dari data tabel di atas maka diketahui peran perencanaan sebagai ukuran untuk mengetahui sasaran dalam pelaksanaan pembangunan dapat dikatakan “sangat baik” karena dari 68 responden maka yang menyatakan sangat baik ada sebanyak 22 orang atau (32,35%) yang disebabkan dalam melaksanakan setiap pembangunan di kecamatan atau di desa telah mempunyai pedoman yang jelas untuk kegiatannya, selain itu yang menyatakan “baik” ada sebanyak 11 orang atau (16,17%) dan yang menyatakan “ragu-ragu” ada sebanyak 16 orang atau (23,52%) dan yang menyatakan “kurang baik” ada sebanyak 10 responden atau (14,70%) dan yang menyatakan “tidak baik” ada sebanyak 9 responden atau (13,23%).

Table V.11. Tanggapan Responden Tentang Peran Perencanaan untuk Memperoleh Hasil Guna yang Optimal dalam Pembangunan

No	Kategori jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat baik	11	16,17
2	Baik	11	16,17
3	Ragu-ragu	12	17,64
4	Kurang Baik	19	27,94
5	Tidak baik	15	22,05
	Jumlah	68	100%

Sumber : data olahan lapangan 2013

Dari data tabel di atas maka diketahui peran perencanaan sebagai ukuran untuk mengetahui sasaran dalam pelaksanaan pembangunan dapat dikatakan “kurang baik” karena dari 68 responden maka yang menyatakan “sangat baik” ada sebanyak 11 orang atau (16,17%) yang disebabkan dalam melaksanakan setiap pembangunan di kecamatan atau di

desa tidak sesuai dengan kebutuhan yang di perlukan masyarakat. yang menyatakan “baik” ada sebanyak 11 orang atau (16,17%) yang menyatakan “ragu-ragu” ada sebanyak 12 orang atau (17,64%) dan yang menyatakan “kurang baik” ada sebanyak 19 responden atau (27,94%) dan yang menyatakan “tidak baik” ada sebanyak 15 responden atau (22,05%).

Table V.12. Tanggapan responden tentang peran perencanaan sebagai alat untuk memberikan suatu keyakinan Dalam Pembangunan

No	Kategori jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat baik	10	14,70
2	Baik	14	20,58
3	Ragu-ragu	8	11,76
4	Kurang Baik	17	25
5	Tidak baik	19	27,94
	Jumlah	68	100%

Sumber : data Olahan lapangan 2013

Dari data tabel di atas maka diketahui peran perencanaan sebagai alat untuk memberikan suatu keyakinan dalam pembangunan dapat dikatakan “tidak baik” karena dari 68 responden maka yang menyatakan sangat “baik” ada sebanyak 10 orang atau (14,70%) yang disebabkan masyarakat tidak yakin akan peran Camat dalam melaksanakan setiap perencanaan pembangunan di kecamatan atau di desa, selain itu yang menyatakan “baik” ada sebanyak 14 orang atau (20,58%) dan yang menyatakan “ragu-ragu” ada sebanyak 8 orang

atau (11,76%) dan kurang “kurang baik” ada sebanyak 17 responden atau (25%) dan yang menyatakan “tidak baik” ada sebanyak 19 responden atau (27,94%).

Table V.13. Tanggapan Responden Tentang Peran Perencanaan Sebagai Alat Untuk Memberikan Suatu Pendapat dalam Perencanaan Pembangunan

No	Kategori jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat baik	12	17,64
2	Baik	11	16,17
3	Ragu-ragu	22	32,35
4	Kurang Baik	11	16,17
5	Tidak baik	12	17,64
	Jumlah	68	100%

Sumber : data Olahan lapangan 2013

Dari data tabel di atas maka diketahui peran perencanaan sebagai alat untuk memberikan suatu pendapat dalam pelaksanaan pembangunan dapat dikatakan “ragu-ragu”. karena dari 68 responden maka yang menyatakan “sangat baik” ada sebanyak 12 orang atau (17,64%) yang disebabkan masyarakat ragu akan peran Camat dalam memberikan pendapat dalam perencanaan pembangunan baik di kecamatan atau di desa, selain itu yang menyatakan “baik” ada sebanyak 11 orang atau (16,17%) dan yang menyatakan “ragu-ragu” ada sebanyak 22 orang atau (32,35 %) dan yang menyatakan “kurang baik” ada sebanyak 11 responden atau (16,17%) dan menyatakan “tidak baik” ada sebanyak 12 responden atau (17,64%).

Maka selanjutnya disini akan diuraikan secara terperinci mengenai Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam perencanaan pembangunan fisik di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. yaitu :

Suatu rencana kerja yang baik tentu harus diawali dengan berbagai informasi terutama dari mereka yang akan dijadikan objek dari pembangunan itu sendiri. Hal ini diperlukan bila pembangunan untuk masyarakat maka keinginan masyarakatlah yang harus dijadikan acuan bagi penyusunan berbagai program pembangunan desa dan kecamatan. Menyadari tingkat pengetahuan masyarakat relatif rendah karena itu pembinaan dari camat, kepala desa, dan pegawai pemerintahan. Peran pemerintah sangat di perlukan terutama melalui pembinaan atau bimbingan bagi masyarakat yang ada.

Kemudian untuk mengetahui tanggapan responden dari tabel yang ada penulis akan merekap ulang tabel yang membahas tentang peran perencanaan tersebut menjadi satu supaya bisa dimengerti. Adapun tanggapan responden tentang 10 pertanyaan yang peneliti ajukan. dapat dilihat seperti pada tabel berikut ini :

Tabel V.14. Tanggapan Responden Peran Perencanaan dalam Pelaksanaan Pembangunan

No	Peran perencanaan	Tanggapan responden					Jumlah
		A	B	C	D	E	
1	- Sebagai pedoman pelaksanaan	22	11	16	10	9	68
2	- Sebagai alat pengendalian	17	15	21	7	8	68
3	- Sebagai alat pengawasan	16	10	22	11	9	68
4	- Sebagai alat penilaian	17	19	10	14	8	68
5	- Sebagai ukuran untuk mengetahui sasaran	11	15	19	11	12	68
6	- Sebagai ukuran untuk mengetahui tujuan yang telah ditentukan	16	10	22	11	9	68
7	- Untuk memperoleh daya guna	22	11	16	10	9	68
8	- Untuk memperoleh hasil guna yang optimal	11	11	12	19	15	68
9	- Sebagai alat untuk memberikan suatu keyakinan	10	14	8	17	19	68
10	- Sebagai alat untuk memberikan suatu pendapat	12	11	22	11	12	68
	Jumlah	154	127	168	121	110	680
	Persentase	22,65%	18,68%	24,70%	17,79%	16,18%	100%

Sumber, Data olahan penelitian 2013

Dari hasil tabel rekapitulasi jawaban responden diatas mengenai pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang menyatakan “ sangat baik” ada sebanyak 22,65%% dari keseluruhan jumlah

responden sebanyak 68 orang karena selama ini telah menetapkan peranan perancangan dalam pembangunan di Kecamatan.

Tanggapan responden “baik” ada sebanyak 18,68%, Sedangkan yang menyatakan “ragu-ragu” ada sebanyak 24,70%, yang menyatakan “kurang baik” ada sebanyak 17,79%, Selanjutnya yang menyatakan tidak baik ada sebanyak 16,18%.

Selanjutnya rekapitulasi keseluruhan dapat diolah dengan menggunakan rumus :

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

$$A = 5 \times 154 = 770$$

$$B = 4 \times 127 = 508$$

$$C = 3 \times 160 = 504$$

$$D = 2 \times 121 = 242$$

$$E = 1 \times 110 = 110 +$$

$$\text{Total Frekuensi} \quad 2134$$

$$N = 680 \times 5 = 3400$$

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

$$P = \frac{2134}{3400} \times 100\%$$

$$P = 62,76$$

Dari uraian diatas maka diketahui peran perencanaan yang di lakukan Desa dalam kategori “

Baik ” hal ini sesuai dengan hasil rekapitulasi jawaban responden secara keseluruhan sebesar **62,76 %** atau berada pada jarak interval 61% - 80%. peran perencanaan dapat dikatakan baik karena dalam pembangunan ini bisa sebagai alat untuk meyakinkan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, walaupun masih banyak terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan di Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

5.3 Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Dalam menjalankan fungsinya ini banyak hambatan pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan antara lain yaitu :

- a. Kurangnya anggaran yang di sediakan oleh Kecamatan sehingga membatasi kegiatan pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya.
- b. Tidak dipahaminya instruksi yang diberikan camat seperti instruksi mengenai penanganan anggaran yang selalu di salah mengerti oleh kepala desa yang ada, hal ini terlihat dalam pelaksanaan pembanguna sering kekurangan anggaran jadinya dan tidak sesuai dengan rencana .
- c. Tidak adanya rencana yang jelas dari camat terhadap desa dalam pelaksanaan pembanguna ini sehingga sering terjadi dualisme kebijakan dalam pelaksanaanya.

5.3. Beberapa Alasan Desa Tidak Dapat Merealisasikan Pembangunan yang di Usulkan Masyarakat

Dari berbagai usulan pembangunan yang di ajukan oleh masyarakat melalui Desa kepada Camat maka diketahui tidak seluruh aspirasi atau usulan tersebut bisa di jalanka atau di kabulkan oleh pemerintah hal ini disebabkan oleh beberapa alasan antara lain :

- a. Camat dalam merealisasikan usulan pembangunan melihat terlebih dahulu usulan mana yang dianggap lebih bermanfaat pada masyarakat
- b. Camat dalam merealisasikan usulan pembangunan juga melihat dari pada anggaran yang tersedia apakah anggaran yang tersedia cukup untuk setiap usulan yang di ajukan desa/kelurahan
- c. Camat mempertimbangkan usulan pembangunan dari desa dengan melihat kemampuan dari desa/kelurahan apakah bisa untuk mengelola pembangunan yang di usulkan

- d. Camat tidak mengabulkan suatu usulan pembangunan desa dengan alasan masih ada kepentingan atau kebutuhan dari pemerintah yang lebih penting di bandingkan dengan usulan dari desa/kelurahan
- e. Camat menolak atau tidak merealisasikan suatu usulan pembangunan dengan alasan pembangunan yang di ajukan desa/kelurahan bentuknya selalu sama setiap tahun anggaran dan tidak terjadi perubahan terhadap usulan yang diajukan dari tahun sebelumnya.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

1. Bahwa pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan telah di jalankan secara optimal karena masih adanya beberapa hambatan dari pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan seperti tidak dipahaminya instruksi mengenai pelaksanaan pembangunan serta tidak sesuainya rencana dari kecamatan dengan desa.
2. Mengenai pelaksanaan pembangunan diketahui belum berjalan secara baik karena pembangunan yang di rencanakan kurang efektif seperti hasil yang di buat oleh Camat masih ada yang kurang sesuai dengan keinginan masyarakat sekitar seperti pengerasan jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat namun tidak pernah terealisasi.
3. Diketahui pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Belum berjalan dengan baik dan kurang optimal karena perencanaan yang ada tidak sama dengan yang di rumuskan oleh kecamatan dan desa.
4. Tidak difahaminya instruksi yang diberikan camat seperti instruksi mengenai penanganan anggaran yang selalu di salah mengerti oleh kepala desa yang ada, hal ini terlihat dalam pelaksanaan pembanguna sering kekurangan anggaran jadinya dan tidak sesuai dengan rencana .
5. Tidak adanya rencana yang jelas dari camat terhadap desa dalam pelaksanaan pembanguna ini sehingga sering terjadi dualisme kebijakan dalam pelaksanaanya.

6. Kurangnya anggaran yang di sediakan oleh camat yang berasal dari Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) sehingga membatasi kegiatan desa dalam menjalankan tugasnya.

6.2. Saran

1. Sebaiknya pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan harus lebih optimal, juga perlu ditingkatkan guna pemerataan pembangunan di setiap sektor pada setiap kecamatan hingga kedesa.
2. Pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
3. Dianjurkan kepada camat agar dapat menjalankan tugasnya dan membuat rencana pembangunan bersama kepala desa serta BPD yang disediakan oleh pemerintah kabupaten sehingga perencanaan pembangunan akan optimal sesuai dengan yang di inginkan masyarakat
4. Sebaiknya camat mensosialisasikan terlebih dahulu rencana pembangunan yang akan dilakukan di setiap desa.

Dianjurkan kepada kecamatan untuk menjalankan instruksi yang di berikan kepada desa supaya perencanaan pembangunan berjalan dengan baik serta melakukan pembangunan secara merata disemua desa/kelurahan yang ada di daerah ruang lingkup kecamatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Awang, Azam, 2010, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bartakusumah, Ahmad. 2005. *Manajemen Pelayanan Umum*. Jakarta: Institut Ilmu Pemerintahan Press.
- Fielman, Mark. 2002. *Manajemen Strategi (Konsep)*. Jakarta: PT Prenhallindo.
- Hakim, Abdul. 2002. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Ekonesia, KAmplus Fakultas Ekonomi UII.
- Hasibuan, Malayu. 2001. *Manajemen Pelayanan Masyarakat*. Jakarta: LAN-RI Edisi ke-2.
- Irman. 2008. *Psikologi Sosial*. Jakarta:
- Kartasasdmata, Ginanjar. 2004. *Manajemen Pembangunan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Koesoemohatmodjo, Agus. 2009. *Perencanaan Dalam Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kuswata, R Agustoha. 2005. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Mahaka Media.
- Notosusanto, Nugroho dan Randi Andika. 2007. *Suatu Tinjauan Mengenai Pembangunan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga
- Rasyid, Muhammad Ryaas. 2001. *Makna Pemerintahan (Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan)*. Jakarta: PT. Yarsif Watampone.
- Sarwoto. 2005. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Siagian.2004. *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Singarimbun Masri dan Efendi Sofyan. 2005. *Metodologi Penelitian Survey*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soemarwoto. 2003. *Winning Strategy Strategi Effetif Merebut & Mempertahankan Pangsa Pasar*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Sufian. 2005. *Organisasi, Manajemen dan Aplikasi*. Pekanbaru: UIR Press.
- Sugiyono. 2005. *Manajemen Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suharto. 2008. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: PT. Gunung Agung.

Suryadi. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Aksara.

Syamsi, Ibnu. 2006. *Perencanaan yang Efektif*. Jakarta: Hajimasagung.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 2007. *Administrasi Pembangunan*. Bandung: Rineka Cipta.

Todaro, Michaelp. 2000. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Wasistiono, Sadu, M. Irwan Taher, 2007, *Prospek Pengembangan Desa*, Jakarta : Fokus Media

Widjaja, HAW, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada.